

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 REVISI KEDUA



POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN

 www.pnn.ac.id

 politekniknunukan@gmail.com

 [klik.pnn](https://www.instagram.com/klik.pnn)

 Jl. Limau, Sedadap, Nunukan Selatan,
Kab. Nunukan Kalimantan Utara



KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN
NOMOR 2079/PL44/KP/2024
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN
TAHUN 2020-2024

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pencapaian Institusi Politeknik Negeri Nunukan memerlukan suatu panduan yang memuat arahan dan capaian serta indikator keberhasilan yang tertuang dalam suatu Rencana Strategis (Renstra);
 - b. bahwa Rencana Strategis Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020 – 2024 yang telah diberlakukan dipandang perlu untuk direvisi guna diselaraskan dengan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Perubahan Kedua Rencana Strategis Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020 - 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pendirian, Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 121505/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Nunukan Periode Tahun 2020-2024;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN TAHUN 2020 - 2024

KESATU : Perubahan Kedua Rencana Strategis Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020 – 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Rencana Strategis ini merupakan panduan atau acuan dalam perencanaan dan pengembangan Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 30 Juli 2024
DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN



ARKAS VIDDY, Ph.D.,
NIP. 196505081992031001

Kata Pengantar

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas tersusunnya dokumen Renstra Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020–2024 Revisi Ke-2. Dokumen ini merupakan dokumen pengembangan PNN dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, yang memuat tahapan-tahapan capaian yang akan dilakukan PNN untuk menyongsong pencapaian Visi dan Misi PNN menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Unggul dan Luar Biasa di Kalimantan. Pada masing-masing tahapan memuat capaian dan target yang menjadi indikator kinerja utama .

Revisi Renstra ini diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan. Salah satu alasan utama adalah perubahan lingkungan eksternal, seperti kondisi teknologi dan atau regulasi (Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan) yang dapat mempengaruhi strategi yang ada sehingga membantu mengidentifikasi dan memperbaiki masalah agar tetap selaras dengan visi dan misi politeknik.

Dokumen ini menjadi sebuah acuan utama PNN selama kurun waktu 5 tahun ke depan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilakukan setiap tahun. Semoga PNN menjadi sebuah perguruan tinggi yang mampu memberi kontribusi sangat signifikan bagi peningkatan daya saing khususnya di kalimantan Utara dan indonesia pada umumnya.

Nunukan, 30 Juli 2024

Direktur,



Arkas Viddy, Ph.D

NIP. 196605081992031001

Daftar Isi

Lembar Identitas dan Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Istilah	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum.....	1
B. Landasan Hukum	8
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra.....	10
D. Kondisi Internal.....	11
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	29
A. Visi.....	29
B. Misi.....	30
C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan.....	32
D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	36
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	54
A. Target Kinerja	54
B. Kerangka Pendanaan.....	70
BAB V PENUTUP	76
A. Pedoman Pelaksanaan.....	76
B. Kaidah Pelaksanaan.....	77
LAMPIRAN	79

Daftar Tabel

Tabel 1. Data Pegawai PNN 2024	12
Tabel 2. Mahasiswa Aktif	13
Tabel 3. Data Lulusan	13
Tabel 4. Sarana Dan Prasarana	16
Tabel 5. Daftar MoU Tahun 2022 s.d. 2024	18
Tabel 6. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Indikator Kinerja Tujuan	34
Tabel 7. Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran	34
Tabel 8. Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis	41
Tabel 9. Arah Kerangka Regulasi.....	45
Tabel 10. Pembangunan Reformasi Birokrasi PNN.....	51
Tabel 11. Target Kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021):.....	54
Tabel 12. Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023)	56
Tabel 13. Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023.	60
Tabel 14. Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023	65
Tabel 15. Realisasi Dan Rencana Proyeksi Pendapatan.....	71
Tabel 16. Kerangka Pendanaan tahun 2022-2023.....	72
Tabel 17. Kerangka Pendanaan 2024	73

Daftar Gambar

Gambar 1. Lokasi Politeknik Negeri Nunukan.....	3
Gambar 2. Posisi Kondisi Politeknik Negeri Nunukan.....	23
Gambar 3. Stuktur Organisasi.....	46

Daftar Istilah

PNN	: Politeknik Negeri Nunukan
Renstra	: Rencana Strategis
PDD	: Program Studi Diluar Domisili
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PPPK	: Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja
PPNPN	: Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
TENDIK	: Tenaga Kependidikan
MBKM	: Merdeka Belajar Kampus Merdeka
DIKTI	: Pendidikan Tinggi
SIA	: Sistem Informasi Akademik
SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
RKA-K/L	: Dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga
DUDI	: Dunia Usaha dan Dunia Industri
SDM	: Sumber Daya Manusia
IKU	: Indikator Kinerja Utama

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Sejarah singkat satuan kerja

Pada bulan Juni 2014, Surat Mandat pembukaan Program Studi Diluar Domisili (PDD) Politeknik Negeri Samarinda rintisan Politeknik Negeri Nunukan diterima dan bisa dilaksanakan penerimaan mahasiswa baru dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2018 tersebut Manajemen PDD Politeknik Negeri Nunukan telah mencoba mengusulkan dengan memasukkan dokumen kelengkapan kemandirian ke bagian kelembagaan khususnya Kasubdit Kelembagaan pada saat itu dijabat oleh Bapak Darsono, namun jawaban yang diterima pada saat itu adalah belum ada anggaran untuk menegerikan PDD mengingat PDD yang dalam bentuk Akademi Komunitas yang sudah dinegerikan masih perlu dipelajari perkembangannya sehingga usulan ini masih belum diterima. Selanjutnya terjadi perubahan pejabat di bagian kelembagaan, dan manajemen PDD Politeknik Negeri Nunukan mencoba mengusulkan yang kedua kalinya kepada Kasubdit Kelembagaan yang baru yaitu Bapak Endang, dan sayangnya jawabannya kurang lebih sama yaitu sekarang ini dilakukan moratorium. Selanjutnya manajemen PDD Politeknik Negeri Nunukan mengusulkan kejenjang yang lebih tinggi yaitu Direktorat Pendidikan Tinggi yang saat itu dijabat oleh Dr. Ridwan. Ternyata kali inipun mendapat penolakan dengan alasan yang sama, yaitu adanya moratorium.

Proses penegerian mulai dilaksanakan dan Tim Reviewer Kementerian Ristek dan Dikti melaksanakan site visit ke PDD Politeknik Negeri Nunukan untuk memeriksa dan menilai kondisi fisik dan memastikan apakah semua sudah memenuhi persyaratan. Ternyata semua sudah sesuai dan diminta surat bukti komitmen pemerintah kabupaten Nunukan terhadap pembiayaan PDD Politeknik Negeri Nunukan dan diinstruksikan dilakukan penyerahan asset, sarana dan prasarana dari pemerintah Kabupaten Nunukan kepada Kementerian Pendidikan Ristek dan Dikti.

Setelah semua asset diserahterimakan dirasa perlu untuk segera menyelesaikan penegeriaan PDD Politeknik Negeri Nunukan. Ternyata pada tahun 2019 terjadi perubahan nomen klatur dimana Kementerian Pendidikan Ristek dan Dikti dirubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga proses menunggu sampai ditetapkannya nomenklatur yang baru.

Nomenklatur sudah benar-benar diterapkan, barulah proses penegerian dilanjutkan dan setelah beberapa kali pembahasan di Kementerian PAN-RB, baru mendapat persetujuan dan dilanjutkan dengan penetapan Peraturan Menteri Pendidikan No 42 Tahun 2020 pada tanggal 24 September 2020. Tentang pembentukan Organisasi Tata Kerja (OTK) Politeknik Negeri Nunukan, Penetapan ini dilanjutkan dengan pelantikan Direktur Politeknik Negeri Nunukan atas nama Arkas Viddy, SE, MM, PhD sebagai Direktur Defenitif Pertama Politeknik Negeri.

Pada Tahun 2020-2021 PNN menggunkan anggaran dari Politeknik Negeri Samarinda, dimana pengukuran kinerja belum ada masih menyatu dengan satker Polnes. Pada tahun 2022 PNN resmi menggunkan anggran sendiri terpisah dari Satker Polnes, dengan demikian pengukuran untuk PNN di mulai tahun 2022.



Gambar 1. Lokasi Politeknik Negeri Nunukan

2. Latar Belakang Penyusunan Renstra 2020-2024

Perguruan tinggi memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan bangsa. Melalui fungsi transformasi sumber daya manusia, Iptek dan sosial, perguruan tinggi menempati posisi yang strategis dalam perubahan masyarakat. Bangsa Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar dengan akan diberlakukannya era perdagangan bebas dan era globalisasi. Perkembangan masyarakat yang begitu pesat dalam berbagai aspek kehidupan sebagai dampak dari kebutuhan hidup, pembangunan dan globalisasi menuntut penyelesaian yang sistematis dan terus menerus dalam menjawab tantangan kebutuhan jenis dan kualitas sumberdaya manusia. Dalam era globalisasi, pendidikan tinggi akan mengalami kecenderungan perkembangan yang amat cepat dan dinamis sebagai konsekuensi dinamika peluang dan tantangan yang harus dihadapi baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional. Oleh karena itu perguruan tinggi, termasuk Politeknik Negeri Nunukan harus mampu menjawab tantangan masa depan tersebut dengan melaksanakan tugas, fungsi dan peran

sebaik-baiknya khusus peningkatan kualitas SDM lokal yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing bangsa.

Untuk peningkatan daya saing bangsa perlu dilakukan tindak lanjut pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan lembaga terkait dalam hal ini kementerian pendidikan dan kebudayaan dengan berbagai jenis lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk lembaga pendidikan Politeknik yang merupakan pelapor pendidikan jenis vokasi. Untuk implementasi kegiatannya semua lembaga pendidikan tinggi tersebut haruslah merumuskan rencana kegiatan Strategisnya yang tertuang dalam Renstra Politeknik yang terstruktur dalam kurun waktu lima tahun.

Penyusunan Renstra ini dimaksud sebagai pedoman untuk penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik Negeri lima tahun ke depan. Renstra ini bukanlah merupakan pedoman yang statis, melainkan dinamis. Dengan maksud Renstra dapat ditinjau ulang secara periodik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan. Peninjauan Renstra juga dapat dilakukan sesuai dengan perubahan-perubahan penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik.

Renstra ini disusun berdasarkan kesadaran, kehendak dan kebutuhan bersama untuk dijadikan sebuah pedoman bagi penyelenggaraan dan pengembangan Politeknik, agar setiap keputusan diambil dan setiap langkah yang di tempuh oleh setiap unsur pada setiap level merupakan bagian dari upaya untuk menuju tujuan bersama yang sudah ditetapkan.

Untuk mengelola pengembangan unit unit kerja dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan, laju perubahan cepat, tuntutan masyarakat yang lebih

maju, kehidupan yang sangat di pengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi pada umumnya, dirasakan perlunya perencanaan strategis. Perencanaan strategis pada hakekatnya adalah satu kerangka kerja yang berorientasi pada penanggulangan isu, sehingga rencana kerja disusun berdasarkan isu pokok. Isu tersebut dijabarkan dari kondisi internal dan eksternal. Kondisi internal mengindikasikan adanya kemungkinan kekuatan dan kelemahan, sedangkan kondisi eksternal mengindikasikan kemungkinan peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

3. Latar Belakang Revisi Renstra Pertama

Untuk membangun sinergi dan meningkatkan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama pada Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. Setiap Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam:

- a. menetapkan rencana kinerja;
- b. menyusun rencana kerja dan anggaran;
- c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja;
- d. menyusun laporan kinerja; dan
- e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka PNN melakukan revisi pertama rencana strategis yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 / M / 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri

Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

4. Latar Belakang Revisi Renstra Kedua

Cakupan indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 / M/ 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerlukan peruiasan sehingga perlu diganti. berdasarkan Hal tersebut diatas maka PNN melakukan revisi kedua rencana strategis yang mengacu pada Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

Adapun Capaian Kinerja Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2022 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2022	Capaian	
				2023	2024
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	12,31	0	-
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	0	24,29	-
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja	%	0	24,24	-

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2022	Capaian	
				2023	2024
	sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi				
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	77,78	10,53	-
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	0,33	20,61	-
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	100	100	-
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	9,94	0	-
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	0	0	-
SK. 4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
SK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	-	BB	-
SK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas	Nilai	91,57	90,65	-

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline 2022	Capaian	
				2023	2024
	Pelaksanaan RKA-K/L				
SK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	-

B. Landasan Hukum

Landasan hukum mengacu pada dasar-dasar atau norma-norma hukum yang menjadi pijakan atau fondasi untuk keberlakuan suatu peraturan, kebijakan, atau sistem hukum dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Landasan hukum ini mencakup berbagai sumber hukum yang diakui, seperti konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum. Berikut beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan penyusunan renstra PNN:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

- Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 42 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kelola Politeknik Negeri Nunukan;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

16. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 210/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

Renstra adalah dokumen yang penting dalam manajemen organisasi, baik itu pemerintah, perusahaan, atau lembaga non-profit. Maksud dari penyusunan Renstra adalah untuk memberikan arah strategis jangka menengah hingga panjang bagi organisasi dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Maksud dan tujuan penyusunan Renstra meliputi beberapa hal sebagai berikut:

1. Pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PNN yang berisi pernyataan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran serta strategi pencapaiannya melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan;
2. Salah satu wujud akuntabilitas, transparansi, dan pernyataan mutu kepada para pemangku kepentingan; dan
3. Pedoman perencanaan operasional untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan institusi.
4. Menjamin kesinambungan dan keajegan kegiatan/program menuju pencapaian tujuan institusi;
5. Menyiapkan suatu kerangka kerja yang menuntut bagi pertumbuhan dan pengembangan program studi.
6. Menyiapkan strategi bagi pengalokasian sumberdaya.
7. mengendalikan kesinambungan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan di PNN dari satu periode ke periode berikutnya demi tercapainya visi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

D. Kondisi Internal

PNN saat ini menerapkan organisasi dan tata kerja sesuai dengan ketentuan dalam **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PNN**. Susunan organisasi PNN seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Senat;
2. Pemimpin;
3. Jurusan;
4. Bagian Akademik dan Umum;
5. Subbagian Umum dan Keuangan;
6. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M);
7. Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP);
8. Unit Pelaksana Teknis: UPT Perpustakaan, UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi, UPT Permesinan dan Peralatan Penunjang, UPT Laboratorium Terpadu dan;
9. Satuan Pengawas Internal ;
10. Dewan Penyantun.

Pada tahun 2024, PNN memiliki sumber daya fungsional yaitu 30 orang dosen, yang terdiri atas 14 orang bertatus PNS, 11 orang berstatus PPPK dan 5 orang bertatus dosen tetap. Sedangkan berdasarkan pendidikan tenaga fungsional terdapat 27 orang berpendidikan S2, dan 3 orang berpendidikan S3.

Mencermati pasal 57 ayat 2 pada statuta PNN, yang berbunyi: Pembinaan sumber daya manusia PNN harus diarahkan untuk meningkatkan kemampuan akademik, keprofesionalan, wawasan, kreativitas, keinovasian, efisiensi dan efektivitas kerja, integritas dan kemandiriannya berikut sistem remunerasi dan kesejahteraannya untuk meningkatkan loyalitas dan disiplin kerja bagi pencapaian tujuan PNN.

PNN belum memiliki sistem pembinaan staf yang sistemik dan terstruktur, baik itu untuk pendidik maupun tenaga kependidikan. Sejak terbitnya Permenpan No. 3 Tahun 2010 dan SK Bersama Kepala BKN dengan Kementerian Pendidikan Nasional, maka mulai tahun 2011, tenaga kependidikan seperti laboran dan teknisi menjadi tenaga fungsional sebagai Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP).

Untuk mendukung proses perkuliahan serta manajemen kelembagaan, Politeknik Negeri Nunukan saat ini didukung oleh 37 orang tenaga kependidikan. Sebanyak 9 orang adalah PNS, 3 orang bertatus PPPK, dan 27 orang Non PNS. Sedangkan berdasarkan pendidikan tenaga administrasi, 4 orang berpendidikan SMA, 13 orang berpendidikan diploma, dan 22 orang berpendidikan S1. Pengelolaan administrasi dilakukan untuk memudahkan proses penyelenggaraan pendidikan dan organisasi di Politeknik Negeri Nunukan. Prinsip kecepatan dan ketepatan mendasari upaya pelayanan yang dilakukan oleh administrasi umum. Untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam mengelola kearsipan, beberapa orang pegawai diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi. Berikut data tendik dan dosen yang ada di PNN.

Tabel 1. Data Pegawai PNN 2024

Status Kepegawaian		Jumlah
PNS Di Perbantukan Dari POLNES	Dosen	3
	Tendik	9
PNS	Dosen	11
	Tendik	9
PPPK	Dosen	11
	Tendik	3
PPNPN	Dosen Tetap	5
	Tendik	27
	Pramubakti	6
	Satpam	4
TOTAL		79

Mahasiswa dan lulusan menghadapi perjalanan yang penuh tantangan dan penemuan. Di kampus, mereka sering berhadapan dengan tekanan akademik yang tinggi, mencari keseimbangan antara tugas kuliah yang menantang dan eksplorasi identitas diri. Tantangan finansial juga sering menghampiri, mendorong mereka untuk mengelola biaya pendidikan dan hidup dengan cerdas. Namun, di tengah perjuangan ini, ada peluang besar untuk membangun hubungan yang berharga dan memperluas jaringan sosial. Bagi lulusan, tahapan selanjutnya sering kali melibatkan pencarian karir yang sesuai dan adaptasi dengan dinamika dunia kerja yang cepat berubah. Semua ini membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan pribadi dan profesional mereka di masa depan. Berikut data mahasiswa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Mahasiswa Aktif

No	Jurusan	Angk 10	Angk 9	Angk 8
		2023 / 2024	2022 / 2023	2021 / 2022
1	Administrasi Bisnis	45	69	71
2	Teknik Sipil Infrastruktur Perkotaan	24	27	25
3	Teknik Alat Berat	32	18	17
4	Teknologi Hasil Perikanan	12	14	23
Jumlah		113	128	136
Total Keseluruhan		377		

Sementara data lulusan PNN dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Data Lulusan

No	Jurusan	Akt 1	Akt 2	Akt 3	Akt 4	Akt 5	Akt 6	Akt 7	Akt 8
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Administrasi Bisnis	79	63	52	63	64	51	37	72
2	Teknologi Hasil Perikanan	13	13	20	18	15	21	9	23
3	Teknik Alat Berat	36	5	15	20	17	13	20	17
4	Teknik Sipil Infrastruktur	62	33	48	36	34	34	19	25

No	Jurusan	Akt 1	Akt 2	Akt 3	Akt 4	Akt 5	Akt 6	Akt 7	Akt 8
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Perkotaan								
	Total	190	114	135	137	130	119	85	137

Kurikulum adalah panduan utama dalam proses pendidikan yang mengatur apa yang dipelajari siswa, bagaimana mereka belajar, dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dengan memperhatikan kebutuhan siswa dan perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan, kurikulum dirancang untuk memberikan landasan yang kokoh dalam pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan dan karir di masa depan. Materi pembelajaran dipilih dengan cermat untuk mencakup berbagai disiplin ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan dan matematika hingga bahasa, seni, dan keterampilan sosial. Metode pengajaran yang bervariasi, seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, atau pembelajaran berbasis teknologi, digunakan untuk memfasilitasi pemahaman mendalam dan aplikasi praktis dari materi pembelajaran. Evaluasi yang berkelanjutan memastikan bahwa siswa mencapai standar yang diinginkan, sementara pengembangan kurikulum terus disesuaikan dengan perubahan dalam kebutuhan pendidikan dan masyarakat global. Dengan demikian, kurikulum bukan hanya sebagai panduan pendidikan formal, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam membentuk masa depan pendidikan dan perkembangan individu. Untuk semua prodi yang ada di PNN sudah mengacu pada kurikulum berbasis MBKM.

Penelitian dan pengabdian masyarakat adalah dua komponen penting yang mendukung peran PNN dalam memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan dunia pada umumnya. Penelitian merupakan kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menemukan pengetahuan baru, mengembangkan teknologi, atau memecahkan masalah yang relevan dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan dan

teknologi. Pendidikan vokasi memainkan peran kunci dalam penelitian dengan menyediakan sumber daya, fasilitas, dan lingkungan yang mendukung para peneliti dalam eksplorasi ide-ide baru dan inovasi.

Di sisi lain, pengabdian masyarakat adalah upaya dari institusi untuk menerapkan pengetahuan dan hasil penelitian mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti penyuluhan, pemberdayaan komunitas, layanan publik, dan proyek kolaboratif dengan stakeholder masyarakat. Melalui pengabdian masyarakat, politeknik tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan dan penelitian, tetapi juga sebagai agen perubahan yang aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Kedua aspek ini saling terkait dan saling mendukung. Penelitian yang kuat menghasilkan inovasi dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam konteks nyata, sementara pengabdian masyarakat membawa manfaat langsung kepada masyarakat dengan menerapkan hasil-hasil tersebut untuk memecahkan masalah yang ada. Dengan memadukan penelitian yang berkualitas dan pengabdian yang berarti, PNN dapat menjadi motor penggerak dalam memajukan masyarakat dan menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. PNN setiap tahun menganggarkan penelitian dan pengabdian untuk dosen.

Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, khususnya untuk kebutuhan perkuliahan ruang dosen dan perkantoran dan laboratorium, adalah 9.825 m². Artinya jika kuantitas mahasiswa dari tahun angkatan 2014 sampai dengan 2024 sekitar 1500 mahasiswa, maka rasio mahasiswa terhadap luas ruang kuliah dan jadwal perkuliahan dibagi 2 shift/hari atau rata-rata 1 mahasiswa berbanding 2,91 m².

Fakta ini PNN masih kurang ideal jika dilihat dari standar ideal 1:3 sampai dengan 1:7 (menurut standar Unesco). Namun jika dikaji berdasarkan edaran dirjen dikti No: 2920/DT/2007, tanggal, 28 September 2007 rasio idealnya masih dapat terpenuhi yaitu lebih dari

1:2. Luas ruang yang digunakan untuk admistrasi dan perkantoran seluas 1660 m2 dibandingkan dengan kuantitas tenaga administrasi sebanyak 35 orang menghasilkan rasio sebesar 1:30,81 dan rasio luas ruang dosen dengan kuantitas dosen sebesar 1:2,55 masih kurang dari standar yang ditetapkan oleh Dikti.

Dari kondisi fasilitas ruang perkuliahan dan perkantoran, dapat dikatakan cukup. Belajar dari pengalaman selama ini adalah, bahwa PNN belum cukup baik dalam merawat setiap hasil pengadaan. Untuk itu dengan adanya penambahan gedung- gedung dan peralatan baru ini maka sangat diperlukan management building yang bertanggung jawab terhadap keberadaan sarana-prasarana tersebut agar selalu dalam keadaan baik dan siap dipergunakan.

PNN mengidentifikasi perolehan sarana dan prasarana pembelajaran tersebut sebagai berikut

Tabel 4. Sarana Dan Prasarana

No	Nama Sarana/Prasarana	Jumlah (lakol)	Kapasitas Per Ruang	Lokasi
				Kampus Utama
1	Ruang Kerja	10	2-3	√
2	Ruang Teori/Kuliah	13	25	√
3	Laboratorium Terpadu Software	-	25	√
4	Laboratorium Bahasa	-	-	√
5	Perpustakaan	1	30	√
6	Kamar Mandi	15	1	√
7	Tempat Ibadah	1	20	√
8	Lapangan Dan Sarana Olaraga	-	-	√
9	Ruang Administrasi (BAU)	1	6	√
10	Ruang Dosen	1	8	√
11	Ruang UKM	1	6	√
12	Laboratorium Komputer	1	25	√
13	Bengkel Alat Berat	1	25	√
14	Bengkel otomotif	-	-	√
15	Laboratorium Sipil	1	25	√
16	Laboratorium Pengetikan	1	25	√
17	Laboratorium Perkantoran	1	25	√

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian di dalam perumusan Rencana Strategis adalah kondisi internal insitusi sendiri, baik dalam kaitannya dengan kekuatan dan kelemahan maupun langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kekuatan dan mengurangi kelemahan. Oleh karena itu, Politeknik Nunukan perlu mengidentifikasi secara lebih cermat dan jujur kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan tersebut serta dapat merumuskan strategis yang tepat untuk mengoptimalisasi kekuatan dan meminimalisasikan kelemahan tersebut.

Penerapan sistem informasi yang efektif dapat memberikan berbagai manfaat, seperti peningkatan efisiensi operasional, pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat dan tepat waktu, integrasi yang lebih baik antara berbagai fungsi bisnis, dan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan sistem informasi yang baik menjadi kunci bagi kesuksesan dan keberlanjutan suatu organisasi di era digital saat ini. PNN saat ini telah menggunakan sistem informasi terpadu akademik yang bernama SIA PNN.

Kerjasama adalah fondasi yang kuat dalam membangun hubungan yang harmonis dan produktif di berbagai konteks kehidupan. Dalam lingkungan kerja, kerjasama antar tim atau departemen memungkinkan kolaborasi yang efektif untuk mencapai tujuan bersama dan memecahkan masalah secara kolektif. Di dunia pendidikan, kerjasama antara siswa dan guru, serta antara sekolah dengan komunitas lokal, mendukung pengembangan potensi individu dan peningkatan mutu pendidikan. Sementara itu, dalam hubungan sosial, kerjasama membangun jaringan sosial yang kuat dan saling mendukung, memperluas kesempatan untuk belajar dari pengalaman orang lain dan memperkaya kehidupan pribadi. Kerjasama yang dibangun di atas dasar komunikasi yang terbuka, kepercayaan, dan pembagian tanggung jawab yang adil tidak hanya menghasilkan hasil yang lebih baik, tetapi juga

menciptakan lingkungan yang inklusif dan membangun solidaritas dalam menghadapi tantangan yang kompleks di era modern ini. Untuk saat ini PNN telah melakukan kerjasama baik dengan pemerintah daerah maupun dengan DUDI yang ada di kawasan Kalimantan Utara.

Tabel 5. Daftar MoU Tahun 2022 s.d. 2024

No	Nama Mitra	Tahun Mulai	Tahun Berakhir
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Utara	02/02/2022	2026
2	Pusat Unggul IPTEKS Pengembangan dan Pemanfaatan Rumput Laut (PUI-P2RL) UNHAS	01/03/2022	2025
3	Koperasi serikat Pekerja Merdeka Indonesia (KOSPERMINDO)	02/03/2022	2025
4	PT. Markija Berdaya Bersama	08/03/2022	2026
5	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	13/04/2022	2023
6	Kemenkumham Kalimantan Timur	14/04/2022	2024
7	Perumda Air Minum Tirta Taka Nunukan	25/04/2022	2025
8	CV. Sandrila Pratama	01/08/2022	2024
9	Yayasan Mutiara Bangsa Sekolah Berbasis Pesantren SMK Mutiara	01/08/2022	2025
10	Politeknik Negeri Bandung	26/08/2022	2025
11	Government College University, Hyderabad Pakistan	24/09/2022	
12	Badan Narkotika Nasional	02/11/2022	2024
13	Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)	16/11/2022	2026
14	Sekolah Menengah Holy Trinity Tawau	17/01/2023	
15	ICEE	06/02/2023	2028
16	Universitas Gadjah Mada	10/02/2023	2026
17	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	03/03/2023	2026
18	Kadin Institute	09/03/2023	2027
19	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara	08/05/2023	2024
20	Universitas Borneo Tarakan	25/05/2023	2027
21	PT. Salam Pacific Indonesia Lines	01/06/2023	2027
22	PT. Nunukan Bara Sukses (Pipit Group)	12/06/2023	2027

No	Nama Mitra	Tahun Mulai	Tahun Berakhir
23	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	28/11/2023	2027
24	Bank Indonesia	29/12/2023	2024
25	Yayasan Lembaga Sertifikasi Profesi Alat Berat Indonesia (LSP ABI)	20/02/2024	2026
26	PT. Metafora Mulia Internasional	01/04/2024	2025

E. Potensi dan Permasalahan

Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats), baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

1. Kekuatan (Strength)

No	Kekuatan	Bobot	Skor	B x S
1	Indikator Capaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi	0.05	8	0.4
2	Dosen Berkualifikasi S2	0.1	9	0.9
3	Team Work Dosen	0.2	9	1.8
4	Komitmen Kuat Sivitas	0.1	9	0.9
5	Struktur Institusi Yang jelas	0.05	8	0.4
6	Audit Internal Institusi secara Berkala	0.05	7	0.35
7	Perubahan Status Negeri	0.1	9	0.9
8	Proses Monitoring dosen secara konsisten	0.1	7	0.7
9	Kompetensi dosen sesuai bidangnya	0.2	7	1.4
10	Dosen aktif dalam kegiatan penelitian	0.05	7	0.35
		1.00	80.00	8.10

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 unsur yang dianggap paling penting yaitu Team Work Dosen dan Kompetensi dosen sesuai bidangnya, sedangkan unsur yang dianggap paling kuat adalah Dosen

Berkualifikasi S2, Team Work Dosen, Komitmen Kuat Sivitas, dan Perubahan Status Negeri. Dari hasil perkalian antara bobot dan skor maka diperoleh nilai 8.10.

2. Kelemahan (Weaknesses)

No	Kelemahan	Bobot	Skor	B x S
1	Belum terbentuknya sistem informasi terpadu	0.2	8	1.6
2	Sarana dan prasana yang belum memadai	0.2	8	1.6
3	Penerimaan SPP yang masih rendah	0.2	9	1.8
4	Minimnya Kerja sama dengan DUDI dan Instansi terkait	0.1	7	0.7
5	Belum terlaksananya <i>Workshop</i> kurikulum ber KKNI	0.1	8	0.8
6	Belum diterapkannya hasil penelitian dosen di dunia industri	0.05	9	0.45
7	Kurangnya motivasi mahasiswa dalam KBM	0.05	7	0.35
8	Kurangnya Soft Skill Mahasiswa	0.05	7	0.35
9	Penjaringan Mahasiswa yang belum maksimal	0.05	7	0.35
10		1.00	70.00	8.00

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 3 unsur yang dianggap paling penting yaitu Belum terbentuknya sistem informasi terpadu, Sarana dan prasana yang belum memadai, dan Penerimaan SPP yang masih rendah, sedangkan unsur yang dianggap paling lemah adalah Penerimaan SPP yang masih rendah dan Belum diterapkannya hasil penelitian dosen di dunia industri. Dari hasil perkalian antara bobot dan skor maka diperoleh nilai 8.00.

3. Ancaman

No	Ancaman	Bobot	Skor	B x S
1	Kurangnya minat terhadap program D3	0.2	8	1.6
2	Kurang sinkronnya jurusan sekolah menengah vokasi dengan program studi yang ada	0.05	6	0.3
3	Terdapat perguruan tinggi lain di wilayah Kaltara	0.05	6	0.3
4	Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 5.0	0.2	8	1.6
5	Adaptasi Kondisi Pandemi	0.05	6	0.3
6	Kurangnya jumlah industri di wilayah Kaltara	0.1	8	0.8
7	Berada di daerah perbatasan	0.05	8	0.4
8	Paradigma masyarakat terhadap jurusan yang ada	0.05	8	0.4
9	Minat masyarakat untuk meningkatkan pendidikan	0.1	8	0.8
10	Komunikasi dan dukungan Alumni	0.1	8	0.8
11	UU No 23 Tahun 2012 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah terutama menyangkut pendidikan	0.05	6	0.3
		1.00	81.00	7.80

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 2 unsur yang dianggap paling penting yaitu Kurangnya minat terhadap program D3 dan Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 5.0, sedangkan unsur yang dianggap merupakan ancaman terbesar saat ini adalah Kurangnya minat terhadap program D3. Dari hasil perkalian antara bobot dan skor maka diperoleh nilai 8.10.

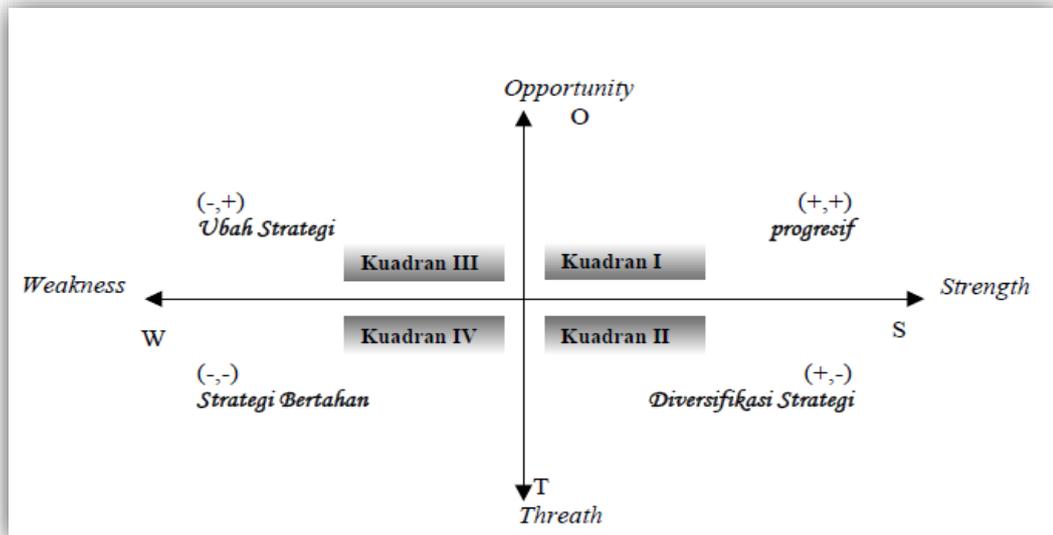
4. Peluang

No	Peluang	Bobot	Skor	B x S
1	PT Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan	0.2	9	1.8
2	Dana CSR dari perusahaan	0.05	6	0.3
3	Ketersediaan Beasiswa Kabupaten dan Provinsi	0.05	7	0.35
4	Kerja sama dengan Lembaga Bahasa Inggris ICEE	0.1	8	0.8
5	Dukungan Pemerintah daerah	0.05	7	0.35
6	Tersedianya peluang kerja sama tri darma dosen dengan DUDI	0.1	7	0.7
7	Banyaknya Jumlah lulusan SMA/SMK per tahun	0.2	9	1.8
8	Keterbatasan pendapatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan keluar Nunukan	0.05	7	0.35
9	Ketersediaan koata KIP kuliah	0.2	8	1.6
		1	68	6.45

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada 3 unsur yang dianggap paling penting yaitu PT Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan, Banyaknya Jumlah lulusan SMA/SMK per tahun dan Ketersediaan koata KIP kuliah, sedangkan unsur yang dianggap paling berpeluang saat ini adalah PT Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan dan Banyaknya Jumlah lulusan SMA/SMK per tahun. Dari hasil perkalian antara bobot dan skor maka diperoleh nilai 6.45.

Dari semua tabel di atas dapat disimpulkan dengan melihat dari sisi internal dan eksternal. Dari sisi internal diketahui bahwa nilai kekuatan sebesar 8.10, sedangkan nilai kelemahan sebesar 8.00 yang menunjukkan bahwa kekuatan lebih besar dari kelemahan. Dilihat dari factor eksternal dapat diketahui bahwa nilai ancaman atau tantangan sebesar 7.80, sedangkan nilai peluang sebesar 6.45 yang menunjukkan bahwa ancaman lebih besar daripada peluang.

Berdasarkan analisis internal dan eksternal menggunakan diagram kartesius 4 kuadran dan untuk mengetahui strategi apa yang sesuai yang digunakan dapat dilihat pada diagram berikut :



Gambar 2. Posisi Kondisi Politeknik Negeri Nunukan

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa posisi kondisi Politeknik Negeri Nunukan pada saat ini berada pada kuadran II (positif, negatif), Posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah **Diversifikasi Strategi**, artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat sehingga diperkirakan roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karena, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya.

Untuk penerapan analisis internal dan eksternal di atas dengan ketentuan bahwa kekuatan lebih besar daripada kelemahan (+) dan peluang lebih kecil daripada ancaman (-) dan berada pada kuadran II sehingga strategi yang disarankan adalah strategi diversifikasi atau dengan kata lain penambahan produk atau jasa yang dihasilkan.

Penambahan produk atau jasa yang dimaksud bisa berupa penambahan program studi (*horizontal diversification product*) dan bisa berupa penambahan jenjang program studi (*vertical diversification product*) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi saat ini

5. Kekuatan (Strenght)

Adapun kekuatan yang dimiliki dalam pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Indikator Capaian Visi, Misi, Tujuan, Strategi;
- b. Dosen Berkualifikasi S2;
- c. Team Work Dosen;
- d. Komitmen Kuat Sivitas;
- e. Struktur Institusi Yang jelas;
- f. Audit Internal Institusi secara Berkala;
- g. Perubahan Status Negeri;
- h. Proses Monitoring dosen secara konsisten;
- i. Kompetensi dosen sesuai bidangnya;
- j. Dosen aktif dalam kegiatan penelitian.

6. Kelemahan (Weaknesses)

Kelamahan yang dapat diidentifikasi dalam Politeknik Negeri Nunukan adalah sebagai berikut;

- a. Belum terbentuknya sistem informasi terpadu;
- b. Sarana dan prasana yang belum memadai;
- c. Penerimaan SPP yang masih rendah;
- d. Belum terlaksananya Workshop kurikulum ber KKNI;
- e. Belum diterapkannya hasil penilitian dosen di dunia industri;
- f. Kurangnya motivasi mahasiswa dalam KBM;
- g. Kurangnya Soft Skill Mahasiswa;
- h. Penjaringan Mahasiswa yang belum maksimal.

7. Peluang (Opportunities)

Peluang yang dapat diidentifikasi dalam pendirian Politeknik Negeri Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. PT Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan;
- b. Dana CSR dari perusahaan;
- c. Ketersediaan Beasiswa Kabupaten dan Provinsi;
- d. Kerja sama dengan Lembaga Bahasa Inggris ICEE;
- e. Dukungan Pemerintah daerah;
- f. Tersedianya peluang kerja sama tri darma dosen dengan DUDI;
- g. Banyaknya Jumlah lulusan SMA/SMK per tahun;
- h. Keterbatasan pendapatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan keluar Nunukan;
- i. Ketersediaan kuota KIP kuliah.

8. Ancaman (Threats)

Ancaman yang dapat diidentifikasi dalam pendirian Politeknik Negeri Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya minat terhadap program D3;
- b. Kurang sinkronnya jurusan sekolah menengah vokasi dengan program studi yang ada;
- c. Terdapat perguruan tinggi lain di wilayah Kaltara;
- d. Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 5.0;
- e. Adaptasi Kondisi Pandemi;
- f. Kurangnya jumlah industri di wilayah Kaltara;
- g. Berada di daerah perbatasan;
- h. Paradigma masyarakat terhadap jurusan yang ada;
- i. Minat masyarakat untuk meningkatkan pendidikan;
- j. Komunikasi dan dukungan Alumni;
- k. UU No 23 Tahun 2012 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah terutama menyangkut pendidikan.

9. Strategi

Memperhatikan analisis internal dan eksternal dari Kabupaten Nunukan maka pendirian perguruan tinggi oleh pemerintah Kabupaten Nunukan layak untuk dilakukan melalui langkah-langkah strategis sebagai berikut:

a. Strategi S-W

Agar kelemahan dari pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat diatasi dengan kekuataanya, maka diperlukan strategis sebagai berikut;

1. Kurangnya sarana dan prasarana dapat diminimalkan dengan adanya perubahan status;
2. Kelemahan berupa kurangnya pembayaran SPP dapat diminimalkan dengan adanya komitmen kuat sivitas akademika dalam hal mendorong meningkatkan kesadaran pembayaran SPP;
3. Minimnya Kerja sama dengan DUDI dan Instansi terkait dapat diminimalkan dengan adanya Kompetensi dosen sesuai bidangnya dan Dosen aktif dalam kegiatan penelitian;
4. Belum terlaksananya Workshop kurikulum ber KKNi dapat diminimalkan dengan adanya Team Work Dosen;
5. Belum diterapkannya hasil penelitian dosen di dunia industri dapat diminimalkan dengan adanya Dosen aktif dalam kegiatan penelitian;
6. Kurangnya motivasi mahasiswa dalam KBM dapat diminimalkan dengan adanya Komitmen Kuat Sivitas.

b. Strategis T-O

Agar tantangan Politeknik Negeri Nunukan dapat diatasi dengan peluang yang dimiliki, maka diperlukan strategi sebagai berikut;

1. Kurangnya minat terhadap program D3 dapat ditingkatkan dengan tersedianya peluang kerja sama tri darma dosen dengan DUDI;

2. Kurang sinkronnya jurusan sekolah menengah vokasi dengan program studi yang ada dapat diminimalkan dengan tersedianya peluang kerja sama tri darma dosen dengan DUDI;
3. Persaingan dengan perguruan tinggi lain di wilayah Kaltara dapat diatasi dengan jenis pendidikan Vokasi yang berstatus Negeri di perbatasan;
4. Perkembangan teknologi informasi dan revolusi industri 5.0 ada dapat diimbangi dengan adanya kerja sama dengan lembaga Bahasa Inggris ICEE;
5. Kurangnya jumlah industri di wilayah Kaltara dapat ditingkatkan dengan adanya dukungan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri;
6. Paradigma masyarakat terhadap jurusan yang ada dapat diubah dengan tersedianya peluang kerja sama lembaga dengan dunia usaha dan dunia industri.

c. Strategis S-O

Agar peluang dari pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat di raih dengan kekuatan yang di miliki, maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1. Merintis jejaring perusahaan-perusahaan tambang, perkebunan, pertanian dan perikanan;
2. Menggalang kerjasama dengan berbagai asosiasi dalam hal pengakuan kompetensi.

Agar kelemahan dari pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat di raih dengan peluang yang dimiliki, maka diperlukan strategi sebagai berikut;

1. Membangun sitem yang terstruktur untuk mencapai visi, misi, dan tujuan institusi;

2. Meningkatkan kemampuan/kompetensi lulusan yang profesional.

d. Strategis S-T

Agar tantangan dari pendidikan Politeknik Negeri Nunukan dapat diantisipasi dengan kekuatan yang dimiliki, maka diperlukan strategi sebagai berikut;

1. Senantiasa memperbaiki dan mengembangkan kualitas penyelenggaraan Politeknik Negeri Nunukan;
2. Menyiapkan lulusan dengan kompetensi yang mempunyai daya saing dan pangsa pasar;
3. Meningkatkan jiwa entrepreneurship.

e. Strategis W-T

Agar kelemahan dan tantangan dari pendirian Politeknik Negeri Nunukan dapat teratasi, maka diperlukan strategis sebagai berikut;

1. Latihan yang dilakukan problem Solving Oriented; dan
2. Meningkatkan frekuensi dan waktu on job training.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Politeknik Negeri Nunukan merupakan lembaga pendidikan vokasional di bidang teknologi berorientasi pada keahlian dan keilmuan untuk menunjang perkembangan dunia industri dan dunia usaha, sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi-nya dengan visi dan misi sebagai berikut;

Visi Politeknik Negeri Nunukan tercantum dalam Dokumen Statuta PNN (dalam proses pengusulan untuk menjadi Permendikbud) adalah sebagai berikut:

**“Menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Unggul dan Luar Biasa
di Kalimantan ”**

Rumusan Visi tersebut mencerminkan indikator unggul dan luar biasa, serta peran nyata kepada bangsa dan Negara dalam pengembangan Teknologi Agroindustri, Teknologi Mesin dan Otomotif, Teknik Sipil, dan Bisnis dan Ekonomi Terapan, terdapat 2 kata kunci yaitu:

1. Pendidikan Tinggi Vokasi Unggul

Kata kunci ini menegaskan posisi Politeknik Negeri Nunukan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di Indonesia yang fokus pada pengembangan teknologi perikanan, teknik alat berat, teknik sipil dan bidang bisnis serta penunjangnya. Sebagai penyelenggara pendidikan vokasi Teknologi Agroindustri, Teknologi Mesin dan Otomotif, Teknik Sipil, dan Bisnis dan Ekonomi Terapan serta penunjangnya maka PNN harus dapat menjadi rujukan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di bidang teknologi bidang-bidang tersebut dan penunjangnya

yang dapat berkontribusi nyata terhadap peningkatan perekonomian Indonesia, provinsi Kalimantan Utara dan khususnya Kabupaten Nunukan.

Unggul dapat diartikan mempunyai keunggulan kompetitif maupun komparatif di Kalimantan pada tahun 2024 dibanding lembaga Pendidikan Vokasi (lembaga pendidikan tinggi) lainnya di Kalimantan, khususnya unggul dalam persentase jenjang pendidikan dosen, pengembangan teknologi informasi, rasio penelitian dosen, dan rasio pengabdian pada masyarakat, rasio publikasi, dan rasio kompetensi dosen. (unggul dalam sarana prasarana pendidikan, kerjasama).

2. Pendidikan Tinggi Vokasi Luar Biasa

Makna operasional dari Luar Biasa ini adalah diukur dari beberapa indikator yang dilihat dari Kinerja Akademik, Kinerja Tenaga Kependidikan dan Prestasi Mahasiswa di Kalimantan pada Tahun 2024

Kinerja Akademik diukur dari Indeks Kinerja Utama (IKU), Kinerja Tenaga Kependidikan meliputi keterampilan/skill perkantoran, operasional diatas rata-rata. Antara target harus lebih tinggi secara signifikan capaiannya setiap tahunnya, baik itu dilihat dari lulusan yang mendapat pekerjaan yang layak, maupun dilihat dari beberapa rasio dosen yang menghasilkan penelitian, menghasilkan pengabdian pada masyarakat, menggunakan bilingual (Indonesia-Inggris) dalam pengajaran, serta jumlah lulusan yang mempunyai sertifikat kompetensi.

B. Misi

1. Merancang inovasi kurikulum yang fleksibel.

Arah kebijakan misi yang menekankan bahwa Politeknik Negeri Nunukan diharapkan mampu;

- a) Menyelenggarakan program pendidikan tinggi profesi yang berkualitas dan profesional dengan kurikulum yang inovatif dan fleksibel;

- b) Mengembangkan dan memperluas akses program pendidikan profesi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan;
- c) Meningkatkan daya saing lulusan.

2. Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi (Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM).

Arah kebijakan misi b menekankan bahwa Politeknik Negeri Nunukan diharapkan mampu;

- a) Menyelenggarakan manajemen administrasi dan operasional pendidikan yang kemahasiswaan, perencanaan, aset, keuangan, kepegawaian, pemasaran/ kehumasan, legalitas, kearsipan, logistik, keamanan, belanja barang dan jasa, pelaporan, dokumentasi, monitoring/ evaluasi dengan menggunakan teknologi informasi kekinian dan terpadu;
- b) Mempersiapkan seluruh perangkat teknologi informasi efektif dalam rangka menjadi Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berkelas dunia;
- c) Meningkatkan budaya penggunaan sistem informasi digital bagi komunitas internal Politeknik;
- d) Mengimbangi pergerakan perkembangan sistem teknologi informasi secara bertahap dan berkesinambungan (*sustainable information technology development*).

3. Mengoptimalkan dan memberdayakan semua sumberdaya.

Arah kebijakan misi C menekankan bahwa Politeknik Negeri Nunukan diharapkan mampu :

- a) Mengoptimalkan dan memberdayakan sumberdaya manusia baik dosen ataupun tenaga kependidikan;
- b) Mengoptimalkan dan memberdayakan sarana dan prasarana perkuliahan;
- c) Menciptakan sumberdaya manusia unggul dalam rangka menuju Politeknik yang unggul;

d) Menciptakan penggunaan sarana dan prasarana secara optimal dan efektif.

4. Mengembangkan riset dan pengembangan terapan, pengabdian pada masyarakat, kerjasama dan publikasi.

Arah kebijakan misi d menekankan bahwa Politeknik Negeri Nunukan diharapkan mampu:

- a) Mengembangkan penelitian terapan dosen dan mahasiswa dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan melakukan pengabdian masyarakat secara berkesinambungan;
- c) Mengembangkan kerjasama yang mampu memberikan manfaat baik secara kelembagaan dan anggota *civitas* akademik;
- d) Mengembangkan partisipasi secara aktif dan memberikan kontribusi conference, publikasi jurnal, dan event akademik baik regional, nasional maupun internasional.

C. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Tata kerja PNN diorientasikan untuk mengembangkan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang sehat. Semua subsistem harus dapat berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Melalui pengelolaan organisasi yang profesional, diharapkan visi dan misi Politeknik dapat terwujud secara optimal. Sebagai salah satu persyaratan administratif dari , tujuan pengelolaan tata kerja tidak terlepas dari tujuan umum itu sendiri, yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Tujuan perubahan tata kerja PNN secara eksplisit dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri;

2. Peningkatan jalinan kerjasama dengan pemangku kepentingan di bidang akademik dan non akademik;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana;
4. Menjadikan PNN sebagai Institusi yang menerapkan Good Governance;
5. Peningkatan Kualitas Dosen;
6. Mengembangkan pengetahuan terapan bidang teknologi dan bisnis yang memajukan penerapan teknologi di industri dan masyarakat;
7. Menjadi kampus hijau di Indonesia.

Tabel 6. Keterkaitan Misi, Tujuan, dan Indikator Kinerja Tujuan

Misi	Tujuan	No	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
Merancang Inovasi Kurikulum Yang Fleksibel	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri	1	Persentase lulusan S1 dan D4 /D3 /D2 /D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	60
		2	Persentase mahasiswa S1 dan D4 /D3/ D2/ D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	30
Mengembangkan Riset dan Pengembangan Terapan, Pengabdian pada Masyarakat, Kerjasama dan Publikasi	Meningkatkan kualitas dosen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI serta keluaran penelitian yang diterapkan masyarakat.	1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	30
		2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	50
		3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat / industri/ pemerintah per jumlah	100

Misi	Tujuan	No	Indikator Kinerja Tujuan	Target 2024
			dosen.	
Mengoptimalkan dan Memberdayakan Semua Sumberdaya	Peningkatkan mutu pengajaran dan kontribusi PNN terhadap DUDI	1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	100
		2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	40
		3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	2,50
Mengembangkan Sistem Teknologi Informasi (Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan dan SDM)	Menjadikan PNN sebagai Institusi yang menerapkan Good Governance	1	Predikat SAKIP	BB
		2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	91
		3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	75

D. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Semangat mewujudkan visi dan misi memerlukan sasaran strategis yang jelas agar tujuan pengembangan, peningkatan kapasitas dan penguatan program serta kegiatan menjadi terarah. Sasaran strategis ini menjadi *outcome* dari pelaksanaan tugas dan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan PNN, dengan rumusan berikut.

1. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran berbasis *teaching industry*, Program Studi baru serta daya saing ditingkat nasional dan atau internasional;
2. Meningkatnya kualitas manajemen Perguruan tinggi modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola manajemen institusi yang berkualitas;
3. Meningkatnya sumber daya dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, professional, berkarakter dan beretika;
4. Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif- inovatif sivitas akademika; dan
5. Meningkatnya kerja sama yang mendorong kepakaran dan peran dosen terhadap pemangku kepentingan.

Uraian program utama PNN dapat diukur dengan indikator kinerja untuk menentukan capaian *outcome* secara institusi dan capaian hasil kegiatan (*output*), seperti terlihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 7. Keterkaitan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran/Utama
1	Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan bisnis yang diakui dunia industri	1.0	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1	Persentase lulusan S1 dan D4 /D3 /D2 /D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta
				1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4 /D3/ D2/ D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.
2	Meningkatkan kualitas dosen yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang diakui DUDI serta keluaran penelitian yang diterapkan masyarakat.	2.0	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi
				2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.
				2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat / industri/ pemerintah per jumlah dosen.
3	Peningkatkan mutu pengajaran dan kontribusi	3.0	Meningkatnya kualitas kurikulum dan	3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja Sasaran/Utama
	PNN terhadap DUDI		pembelajaran	3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.
				3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.
4	Menjadikan PNN sebagai Institusi yang menerapkan Good Governance	4.0	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	4.1	Predikat SAKIP
				4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
				4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Era globalisasi, semua faktor produksi, keuangan, teknologi, jasa informasi dan peralatan dapat bergerak melintasi tapal batas negara tanpa kesulitan berarti. Dunia terasa menjadi semakin sempit, jarak terasa semakin dekat, waktu terasa berjalan semakin cepat, dan mobilitas orang dan barang semakin tinggi. Kondisi tersebut akan mempunyai implikasi langsung terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi nasional. Implikasi-implikasi yang dimaksud adalah:

Pertama, Road Map Pendidikan Nasional 2020-2035 dimana pendidikan tidak hanya berbasis hard skill tapi lebih kepada soft skill. Road Map ini dirancang mengingat kondisi saat ini Indonesia mengalami Pandemi Covid-19 dan dengan sendirinya mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Dalam hal pendidikan akan lebih pada dilaksanakan pembelajaran jarak jauh (online/daring), dan dengan sendirinya meminimalisasi biaya, sedangkan kita dihadapkan pada dunia kerja sudah mempercepat akses digital di semua industri, diikuti dengan memperbarui teknologi termasuk *cyber security* (keamanan data) dan tentunya para pelaku wirausaha akan menjadi pendorong penting pemulihan ekonomi dengan menciptakan cara-cara yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian perlu diurai cara bekerja pada masa depan yang jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat ini dengan ditandai dengan munculnya jenis pekerjaan baru, tenaga kerja multi generasi dan beragam, tidak dibatasi struktur dan tempat, karier

ditentukan oleh pekerja bukan perusahaan, digitalisasi dan otomatisasi teknologi, dimana akses dan pengalihan data semakin massif.

Kedua, implementasi pembelajaran yang menggunakan kurikulum sesuai dengan KKNI dengan berbasis “*Link and Match*” . Dengan model pendidikan saat ini tampak signifikan terjadi kesenjangan antara kualitas lulusan perguruan tinggi (termasuk pendidikan tinggi vokasi) dengan syarat minimal kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan dan dipersyaratkan oleh dunia kerja dan industri. Untuk itu diperlukan penyusunan dan penetapan kurikulum yang sesuai dengan rancangan dan pedoman KKNI dan tentunya telah berdasarkan penelitian dan kajian yang mendalam *Link and Match* nya dengan dunia kerja dan dunia industri.

Ketiga, implementasi “Merdeka Belajar” disesuaikan dengan pendidikan vokasi yang efektif. Kebijakan ini merupakan jawaban atas tuntutan agar Perguruan Tinggi dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan ketrampilan secara optimal dan selalu relevan.

Keempat, perguruan tinggi luar negeri akan semakin mudah menyelenggarakan pendidikan Indonesia, sehingga calon mahasiswa mempunyai peluang yang tinggi untuk memilih perguruan tinggi yang berkualitas. Hal demikian berarti bahwa persaingan antar perguruan tinggi untuk menarik mahasiswa akan semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanya menyangkut *output* melainkan juga biaya penyelenggaraan perguruan tinggi dan kinerja penyelenggaraan pendidikan tinggi, baik yang terkait dengan sumberdaya manusia, fasilitas maupun manajemen.

Isu lain yang mendapatkan perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis adalah implementasi otonomi pendidikan. Pemberlakuan otonomi perguruan tinggi (PT) mempunyai implikasi-implikasi sebagai berikut : (1) adanya mekanisme subsidi pemerintah terhadap perguruan tinggi milik Pemerintah (PTP), (2) strategi yang ditempuh dalam menggali sumber dana

lain di luar subsidi pemerintah, dan (3) strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi.

Dalam kaitannya dengan strategi yang ditempuh oleh perguruan tinggi dalam memenangkan persaingan antar perguruan tinggi terutama dalam menjaring calon mahasiswa, terhadap kecenderungan bahwa masing-masing perguruan tinggi akan bersikap proaktif, terutama dalam membangun berbagai jaringan (*networking*) dengan berbagai institusi untuk berbagai keperluan, baik pendidikan, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Konsekuensinya adalah apabila perguruan tinggi tidak siap dengan langkah-langkah serupa, maka dapat diperkirakan akan selalu tertinggal di belakang dan tidak mampu mengakses berbagai *resources* yang ada di berbagai institusi.

Untuk mendorong terwujudnya perguruan tinggi yang berkualitas, pengelolaan perguruan tinggi secara otonom tidaklah cukup, tetapi juga harus dikelola dalam lingkungan organisasi yang sehat. Oleh karenanya perguruan tinggi dituntut untuk dapat meningkatkan kapasitas institusional dan mutu manajemennya yang mencakup seluruh aspek manajemen pada setiap jenjang organisasi. Aspek manajemen yang dimaksud mencakup bidang program akademik, sumber daya (manusia, keuangan, sarana, dan prasarana, dan informasi), dan mutu. Pada prinsipnya, perguruan tinggi diharapkan untuk dikelola secara profesional dengan mengedepankan prinsip *Good Polytechnic Governance* (GUG) serta mengutamakan mutu layanan khususnya untuk stakeholder internal yaitu mahasiswa, staf, dan dosen.

Tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya manusia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila sebagai landasan Idiil dan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional. Hal ini ditujukan untuk terjaganya keutuhan kesatuan Negara Republik Indonesia (NKRI). Sebagai landasan Idiil, maka Pancasila memberi pedoman setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertindak sehingga tetap mempererat rasa nasionalisme. Sebagai

landasan konstitusional, UUD 1945 merupakan sumber hukum yang digunakan sebagai pedoman penentuan berbagai norma dan etika yang berlaku di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang nomor 25 tahun 2000 menyatakan bahwa ada 3 tantangan besar yaitu :

1. Mempertahankan hasil hasil Pendidikan yang telah dicapai;
2. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam masa kerja;
3. Sejalan dengan diterapkan otonomi daerah system Pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyusuaian sehingga dapat mewujudkan sistem Pendidikan yang lebih demokratis memperhatikan keberagaman kebutuhan daerah dan peserta didik serta mendorong partisipasi masyarakat.

Mempertahankan hasil hasil Pendidikan yang telah dicapai seperti halnya mempertahankan tingkat indek pembangunan manusia, indeks daya saing, indeks teknologi dengan cara menerapkan kurikulum berbasis KKNI dan aplikatif serta menerapkan model dan konsep *link and match*.

Mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam masa kerja dalam hal ini melakukan beberapa hal seperti meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa melalui pelatihan dan uji kompetensi dengan melibatkan industri, meningkatkan Kerjasama dengan berbagai dunia usaha dan industri (DUDI) sebagai refleksi dan implemmentasi konsep merdeka belajar, meningkatkan saran dan prasarana Pendidikan, meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan terapan dengan output publikasi Ilmiah.

Untuk mewujudkan sistem Pendidikan yang lebih demokratis memperhatikan keberagaman kebutuhan daerah dan peserta didik serta mendorong partisipasi masyarakat dapat dicapai melalui penerapan dan berbagai bentuk dan model Merdeka Belajar serta menyediakan Pendidikan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan biaya yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan konsep peta jalan Pendidikan Nasional 2020-2035 yang pada dasarnya memfokuskan pada teknologi, sosiokultural dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa fokus Pendidikan nasional harus berbasis teknologi, sosiokultural dan lingkungan secara seimbang. Keseimbangan tersebut dijabarkan dalam implementasi Merdeka Belajar.

Sasaran Pendidikan yang berfokus pada teknologi mencakup penerapan otomatisasi, AI (*artificial intelligence*), dan big data di semua sektor, konektivitas 5G yang memungkinkan teknologi lainnya saling terhubung seperti kendaraan otonom, drone, dan pencetakan 3D (*3D printing*) *smart wearables*, *augmented* dan realitas maya (*virtual reality*) (AR dan VR).

Sasaran Pendidikan yang berfokus pada sosiokultural mencakup peningkatan usia harapan hidup dan usia lama bekerja, tumbuhnya migrasi, urbanisasi, keberagaman budaya, dan kelas menengah, meningkatkan tenaga kerja yang terus bergerak (*mobile*) dan fleksibel serta munculnya kepedulian konsumen terhadap etika, privasi dan kesehatan.

Sasaran Pendidikan yang berfokus pada lingkungan mencakup peningkatan kebutuhan energi dan air dan berkurangnya sumber daya alam, peningkatan terhadap energi alternatif untuk melawan perubahan iklim serta upaya berkelanjutan pada isu lingkungan seperti plastik dan limbah nuklir.

Ketiga fokus tersebut diatas dicapai dengan beberapa arah kebijakan Pendidikan nasional, salah satunya adalah membangun kompetensi utama yang berorientasi masa depan khususnya perkembangan kurikulum yang fleksibel berdasarkan kompetensi sebagai kerangka menu, penekanan pada ketrampilan lunak (*softskill*) dan pengembangan karakter, dan pelatihan vokasi yang dipimpin industri.

Arah kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik Negeri Nunukan berpedoman pada Peta Jalan Pendidikan Nasional diatas dengan memanfaatkan sumber daya internal maupun eksternal PNN.

Adapun arah dan kebijakan PNN tersebut dibagi menjadi 4 bagian sebagai berikut :

1. Arah Kebijakan
2. Strategi pengembangan
3. Tata Kelola
4. Reformasi Birokrasi

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi PNN dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran PNN adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Arah Kebijakan dan Sasaran Strategis

No	Arah Kebijakan dan Strategi PNN	Sasaran Strategis PNN
1	Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Dosen	Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan berbasis kompetensi, pengembangan program pembelajaran berbasis <i>teaching industry</i> , Program Studi baru serta daya saing ditingkat nasional dan atau internasional
2	Peningkatan tata kelola, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran yang ada	Meningkatnya kualitas manajemen Perguruan tinggi modern dalam pengelolaan pendidikan dengan tata kelola manajemen institusi yang berkualitas
3	Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan tenaga kependidikan yang sesuai	Meningkatnya sumber daya tenaga kependidikan yang kompeten, professional, berkarakter dan beretika
4	Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan	Meningkatnya publikasi karya ilmiah dan karya kreatif inovatif

No	Arah Kebijakan dan Strategi PNN	Sasaran Strategis PNN
	penciptaan inovasi	sivitas akademika
5	Peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan DUDI dalam peningkatan kompetensi lulusan	Meningkatnya kerja sama yang mendorong kepakaran dan peran dosen terhadap pemangku kepentingan

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Dosen

Strategi yang dilakukan oleh PNN adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan strategi pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi mahasiswa, seperti literasi, numerasi, dan karakter;
- b. Memperkuat digitalisasi pembelajaran untuk mengakselerasi transformasi pendidikan, meningkatkan efisiensi serta meningkatkan literasi digital mahasiswa dan dosen;
- c. Melakukan pembinaan minat dan bakat bagi mahasiswa berprestasi;
- d. Menerapkan asesmen internal sebagai instrumen dalam mengukur kualitas hasil belajar mahasiswa;
- e. Menitikberatkan pengembangan *soft skills* seperti: kemampuan berpikir kritis, kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan komunikasi, termasuk penanaman nilai etos kerja, serta kemampuan berwirausaha sehingga mendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;
- f. Menjalankan program Kampus Merdeka untuk mendorong dan membina penguatan proses pembelajaran serta peningkatan kualitas lulusan;
- g. Membangun kerja sama antar perguruan tinggi dengan perguruan tinggi internasional dan dunia industri dalam rangka memperkuat kualitas pembelajaran melalui: penguatan

kompetensi pengajar, pertukaran praktik baik pengajaran, dan penguatan pengukuran mutu lulusan.

2. Peningkatan tata kelola, strategi pembiayaan, dan peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran yang ada

Strategi yang dilakukan oleh PNN adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat mekanisme perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada monitoring pelaksanaan dan evaluasi dampak program;
 - b. penguatan sistem pengawasan internal untuk meningkatkan kepatuhan dan integritas terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. pengembangan Sistem Berbasis Elektronik untuk meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi tata kelola seperti: otomatisasi persuratan, pengadaan barang dan jasa, dan proses kepegawaian;
 - d. memperkuat pengelolaan pembiayaan pendidikan untuk memaksimalkan kontribusi pembiayaan dalam pencapaian sasaran pendidikan di bidang akses dan mutu.
3. Peningkatan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, penempatan dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai

Strategi yang dilakukan oleh PNN adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan transformasi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan melalui perencanaan, rekrutmen, penataan jenjang karir, pelaksanaan penilaian kinerja dan kompetensi;
- b. meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan dengan mendorong dosen melakukan kemitraan dengan pihak luar kampus dengan fokus pada (1) memperoleh pengalaman praktik di dunia industri; (2) melibatkan praktisi untuk terlibat dalam pembelajaran di kampus; dan (3) kerja sama dengan pengajar dari kampus kelas dunia;

4. Peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan penciptaan inovasi

Strategi yang dilakukan oleh PNN adalah sebagai berikut:

- a. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di PNN;
- b. memperkuat proses diskusi antara dunia industri dan pemerintah untuk sinergi dukungan dan meningkatkan relevansi penelitian.

5. Peningkatan kerjasama dengan pemerintah dan DUDI dalam peningkatan kompetensi lulusan

Strategi yang dilakukan oleh PNN adalah sebagai berikut:

- a. memperkuat kerja sama dengan lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga riset nasional maupun internasional untuk mengikuti perkembangan riset, teknologi, dan ilmu pengetahuan global;
- b. mendorong dosen dan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang berorientasi pada solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat;
- c. memperkuat kerja sama dengan dunia industri untuk mendorong hilirisasi penerapan hasil penelitian;
- d. mengupayakan pengembangan dan penguatan infrastruktur penelitian strategis di perguruan tinggi.

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis PNN, beberapa regulasi yang diprioritaskan untuk dilakukan penyesuaian atau perubahan periode tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut.

Tabel 9. Arah Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Peneliti	Target Penyelesaian
1	Pedoman pelaksanaan tracer study	Standar dan pedoman Tracer Study (TS) diperlukan agar dapat dilakukan TS secara maksimum	Setiap tahun
2	Pedoman pelaksanaan MBKM dan Pedoman pelaksanaan mengikuti kompetisi	Kedua pedoman ini diperlukan agar dapat terlaksana MBKM yang bermanfaat dan capaian/prestasi maksimum	Setiap tahun
3	Pedoman kegiatan bertridarma di PT lain Pedoman dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri	Pedoman pedoman ini diperlukan oleh dosen shg dalam melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan administratif dan capaian kinerjanya agar dapat diakui pelaksanaannya,	Setiap tahun
4	Pedoman pelaksanaan kuliah dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, dan dunia industri	Pedoman ini diperlukan daam penentuan dosen praktisi yang akan mengaar di kampus	Setiap tahun
5	Standar proses pembelajaran untuk case method dan PBL	Pedoman ini diperlukan agar RAB dan pelaksanaannya dapat diakui sebagai capaian IKU.	Setiap tahun
6	Pedoman ZI SK team penyusun ZI	Pedoman dan SK untuk kegiatan ini diperlukan agar target capaian IKU dapat terpenuhi.	Setiap tahun

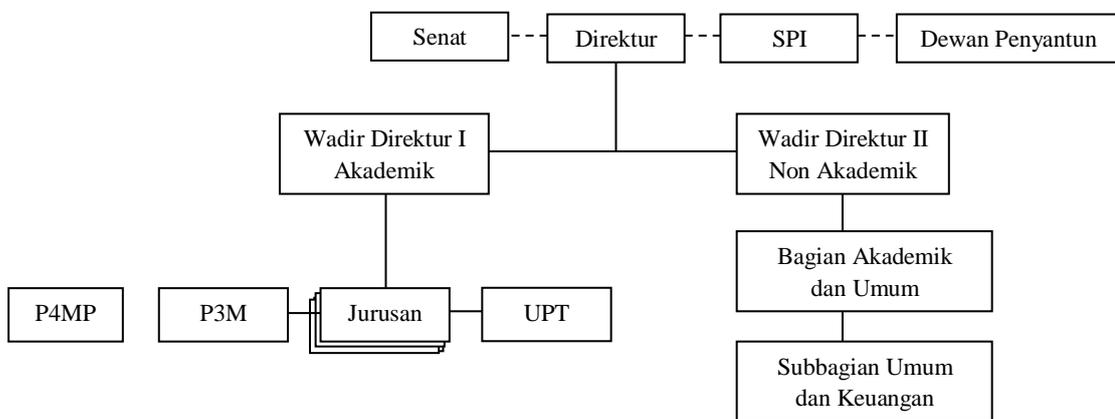
C. Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan pelaksanaan strategi, PNN didukung oleh kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber daya manusia yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan/Pranata Laboran Pendidikan (PLP) secara efektif dan efisien, agar mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya yang diamanatkan kepada Politeknik Negeri Nunukan secara optimal

1) Struktur Organisasi

PNN saat ini menerapkan organisasi dan tata kerja sesuai dengan ketentuan dalam **Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 05/O/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja PNN**. Susunan organisasi PNN seperti yang tertuang pada Keputusan Menteri tersebut di atas adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Stuktur Organisasi

- a) Direktur dan Pembantu Direktur;
- b) Senat Politeknik;
- c) Saat ini Politeknik Negeri Nunukan memiliki 4 Jurusan yang terdiri dari 4 Program Studi yakni: Jurusan Administrasi Bisnis, Teknik Sipil, Teknik Alat berat, dan Teknologi Hasil Perikanan;
- d) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M);
- e) Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP);
- f) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- g) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;

- h) Bagian Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi;
- i) Unit Pelaksana Teknis: UPT Perpustakaan, UPT Permesinan, UPT Laboratorium Terpadu dan UPT Teknologi Informasi dan Kominikasi;
- j) Dewan Penyantun.

2) Tugas Dan Fungsi

Politeknik Negeri Nunukan merupakan pendidikan tinggi vokasi di lingkungan Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen Pendidikan Vokasi), sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Nunukan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi dan berfungsi sebagai :

- a) pengembangan pendidikan vokasi dan profesi;
- b) penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c) pengabdian kepada masyarakat;
- d) pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; dan
- e) pelaksanaan kegiatan administratif.

3) Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik dan merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata

kelola pemerintahan. Reformasi birokrasi juga menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan.

Langkah konkret dalam rangka mengakselerasi pencapaian program kerja Reformasi Birokrasi pada unit kerja pemerintahan yaitu Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada Satker yang memenuhi sebagian besar program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Reformasi Birokrasi meliputi delapan area perubahan, yaitu:

a. Manajemen Perubahan

Mengubah secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya agar menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.

b. Penguatan Peraturan dan perundangan

Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-

undangan. Penguatan peraturan perundangan diharapkan tercapai melalui meningkatnya keterlibatan publik dalam proses perumusan kebijakan; meningkatnya kualitas regulasi yang melindungi, berpihak pada publik, harmonis, tidak tumpang tindih dan mendorong iklim kondusif bagi publik.

c. Penguatan Kelembagaan

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*). Penguatan kelembagaan diharapkan dapat menurunkan tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal. Selain juga untuk meningkatkan kapasitas organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

d. Penguatan Tata laksana

Target dari penguatan tata laksana adalah meningkatnya penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government; meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan; serta meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik.

e. Penguatan Sistem Manajemen SDM

Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pemerintah, yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan. Target penguatan system manajemene SDM adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur; meningkatnya transparansi dan

akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur; serta meningkatnya disiplin SDM Aparatur;

f. Penguatan Pengawasan

Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Target penguatan pengawasan adalah Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara; Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara; meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang penyimpangan oleh aparatur; serta memperoleh opini WTP

g. Penguatan Akuntabilitas

Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Target penguatan akuntabilitas adalah meningkatnya kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya penerapan sistem manajemen kinerja; serta meningkatnya akuntabilitas aparatur.

h. Penguatan Kualitas

Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada masing-masing unit organisasi sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Target penguatan kualitas layanan public adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih baik, lebih murah); meningkatnya jumlah unit pelayanan yang menerapkan standar pelayanan publik; Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; serta meningkatnya profesionalisme aparatur.

Tabel 10. Pembangunan Reformasi Birokrasi PNN

Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi		Ada/ Belum Ada	Base Line 2022	2023	2024
1. Manajemen Perubahan					
a	Tim RE / ZI	Ada			
b	Roadmap RB / Rencana Pembangunan ZI	Belum Ada			
c	Pemantauan dan Evaluasi RB / ZI	Belum Ada			
d	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Belum Ada			
2. Deregulasi Perundangan					
a	Harmonisasi	Belum Dilakukan			
b	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan / keputusan	Belum Dilakukan			
3. Penguatan Kelembagaan/ Organisasi					
a	Penataan organisasi	Belum Ada			
b	Evaluasi kelembagaan	Belum Ada			
c	Tindak lanjut evaluasi	Belum Ada			
4. Penguatan Tatalaksana					
a	Proses Bisnis dan Prosedur Operasional (SOP)	Ada			

Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi		Ada/ Belum Ada	Base Line 2022	2023	2024
b	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Belum Ada			
c	Keterbukaan Informasi Publik	Ada			
5. Penguatan SDM					
a	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Ada (update sesuai kebijakan)			
b	Pola Mutasi Internal	Belum Ada			
c	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Belum Ada			
d	Penetapan kinerja individu	Ada			
e	Penegakkan aturan disiplin / kode etika / kode perilaku pegawai	Ada			
6. Penguatan Akuntabilitas					
a	Keterlibatan pimpinan	Ada			
b	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Ada			
7. Penguatan Pengawasan					
a	Pengendalian Gratifikasi	Belum Ada			

Bidang Penguatan/ Instrumen Reformasi Birokrasi		Ada/ Belum Ada	Base Line 2022	2023	2024
b	Penerapan Sisten Pengendalian Intern Pmerintah (SPIP)	Belum Ada			
c	Pengaduan masyarakat	Ada (Perlu peningkatan media dan pengelolaanya)			
d	Whistle-Blowing System	Belum Ada			
e	Penanganan benturan kepentingan	Belum Ada			
8. Penguatan Area Pelayanan Publik					
a	Standar pelayanan	Ada			
b	Budaya pelayanan prima	Ada			
c	Pengelolaan pengaduan	Ada			
d	Penilaian keputusan terhadap pelayanan	Ada			
e	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ada			
9. QUICK WINS/ Unit Layanan Terpadu		Belum Ada			

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi PNN serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, PNN menetapkan lima sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (outcome) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian yang dimaksud, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP). Berikutnya akan dijabarkan sinkronisasi antara Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11. Target Kinerja 2022-2023 (Kepmendikbud 3/M/2021):

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2022	2023
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%		55	55
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%		10	10
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen				

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2022	2023
	pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%		15	15
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%		30	30
IKU 3.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	hasil penelitian per jumlah dosen		0.10	0.10
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%		35	35
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%		35	35
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan	%		2.50	2.50

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2022	2023
	D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.				
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi				
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat		BB	BB
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai		93.50	94

Tabel 12. Target Kinerja 2023-2024 (Kepmendikbudristek 210/M/2023)

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2023	2024
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi				
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%		60	60
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%		30	30
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi				
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%		30	30
IKU	Persentase dosen yang memiliki	%		50	50

Kode	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Baseline	Target	
				2023	2024
2.2	sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri				
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio		100	100
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran				
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio		100	100
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%		40	40
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%		2.5	2.5
SK. 4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri				
SK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat		BB	BB
SK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai		94	94
SK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai			75

Pada IKU 1 : Untuk Kriteria pekerjaan pada Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 menyebutkan masa tunggu selama 6 bulan dengan penghasilan 1,2 juta sementara pada Kepmendikbudristek 210/M/2023 disebutkan waktu tunggu selama 12 bulan tanpa menyebutkan masa tunggu. Untuk Kriteria kelanjutan studi semua permen sama dan untuk Kriteria kewiraswastaan pada Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 menyebutkan masa tunggu selama 6 bulan sementara pada Kepmendikbudristek 210/M/2023 masa tunggu 12 bulan

Pada IKU 2 : Untuk Kriteria Pengalaman di luar kampus pada Kepmendikbud 210/M/2023 menyebutkan Batas minimal yang dapat dihitung adalah pa-ling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2 sementara pada Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 tidak ada syarat disebutkan tetap mengacu pada 20 SKS. Untuk kriteria prestasi Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 disebutkan berprestasi dalam kompetisi atau lomba paling rendah tingkat nasional sementara pada Kepmendikbud 210/M/2023 bisa tingkat provinsi.

Pada IKU 3 : Pada Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 mensyaratkan perguruan tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang setidaknya memiliki program studi yang terdaftar dalam QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject) sementara pada Kepmendikbud 210/M/2023 syarat tersebut dihilangkan.

Pada IKU 4 : Pada Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 disebutkan Kualifikasi akademik S3/S3 terapan dari perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang relevan dengan program studi sedangkan pada Kepmendikbud 210/M/2023 syarat tersebut dihilangkan

tetapi ditambahkan pada kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi adalah menjadi pekerja lepas.

Pada IKU 5 : Pada dasarnya sama dari ketiga IKU

Pada IKU 6 : Pada kriteria Kemitraan untuk Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 memisahkan antara PTN Akademik, PTN Vokasi, dan PTN Seni Budaya yang masing-masing mempunyai syarat tersendiri sementara Kepmendikbud 210/M/2023 sudah secara umum untuk semua PTN tetapi pada Kriteria mitra disyaratkan perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu subject) dan embaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi sementara untuk Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 disyaratkan perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject).

Pada IKU 7 : Pada Kepmendikbud 210/M/2023 pada Kriteria metode pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) ditambahkan kelompok diberikan project dari dunia usaha industri sementara untuk Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 tidak terdapat poin tersebut.

Pada IKU 8 : Pada kriteria Kemitraan untuk Kepmendikbud 754/P/2020 dan Kepmendikbud 3/M/2021 lembaga Lembaga akreditasi internasional sementara pada Kepmendikbud 210/M/2023 tidak disebutkan.

Berikut ini terdapat sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Sinkronisasi Target Program, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023.

Program	Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja				
							2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengembangan Keterampilan Vokasional	IKU-1	Persentase lulusan S1 dan D4 /D3 /D2 /D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Kesiapan kerja lulusan								
			IK-01	Persentase lulusan memiliki pekerjaan 12 (dua belas) bulan setelah lulus di perusahaan negeri dan swasta	%		-	-	60	70	75
			IK-02	Persentase mahasiswa melanjutkan studi 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	%		-	-	3	5	10
			IK-03	Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta 12 (dua belas) bulan setelah lulus	%		-	-	5	10	12
	IKU-2	Persentase mahasiswa S1 dan D4 /D3/ D2/ D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	Mahasiswa berkegiatan /meraih prestasi di luar program studi:								
			IK-04	Persentase mahasiswa menjalankan kegiatan MBKM	%		-	-	70	80	90

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program	Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja				
							2020	2021	2022	2023	2024
			IK-05	Jumlah mahasiswa meraih prestasi tingkat internasional, nasional dan provinsi	%		-	-	5	10	15
			IK-06	Jumlah karya yang digunakan oleh DUDI dan masyarakat yang dihasilkan oleh mahasiswa							
			IK-07	Jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi internasional			-	-	2	3	5
Program Kerjasama Perguruan Tinggi dan Industri	IKU-3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	Dosen di luar kampus								
			IK-08	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	%		-	-	5	10	10
			IK-09	Jumlah dosen Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time)	%		-	-	5	10	15

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program	Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja				
							2020	2021	2022	2023	2024
			IK-10	Jumlah dosen yang Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan MBKM	Jumlah		-	-	-	4	6
			IK-11	Jumlah dosen yang Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba yang menjadi juara	Jumlah		-	-	5	8	10
			IK-12	Jumlah dosen yang Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.	%		-	-	50	60	70
	IKU-4	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia	Kualifikasi dosen/pengajar								
			IK-13	Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif	%			-	-	25	50

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program	Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja				
							2020	2021	2022	2023	2024
		usaha, atau dunia industri.	IK-14	Dosen yang memiliki Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	%		-	-	20	30	40
			IK-15	Dosen yang memiliki Sertifikasi Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;	%		-	-	5	10	15
			IK-16	Dosen yang memiliki Sertifikasi Dunia usaha dunia industri	%		-	-	5	10	15
			IK-17	Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang berasal dari DUDI, pemerintah, dan Menjadi pekerja lepas (freelancer).	%		-	-	5	10	10
Peningkatan	IKU-	Jumlah keluaran dosen	Penerapan karya dosen:								

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program	Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja				
							2020	2021	2022	2023	2024
penelitian dan Pengabdian terapan Dosen	5	yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat / industri/ pemerintah per jumlah dosen.	IK-18	Jumlah keluaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/ pemerintah per jumlah dosen	Jumlah		-	-	6	8	8
	IKU-6	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Kemitraan program studi:								
			IK-19	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Jumlah		-	-	5	8	10
Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	IKU-7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	Pempelajaran dalam kelas:								
			IK-20	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran keiompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	%		-	-	35	40	40
	IKU-	Persentase program	Akreditasi Internasional:								

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program	Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Satuan	Base Line	Target Kinerja				
							2020	2021	2022	2023	2024
	8	studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	IK-21	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%		-	-	35	100	100
Program Dukungan Manajemen	IKU-9	Predikat SAKIP	IK-22	Rata-rata Predikat SAKIP Satker	Nilai		-	-	-	BB	BB
	IKU-10	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	IK-23	Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker	Nilai		-	-	93.50	94	94
	IKU-11	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	IK-24	Nilai Evaluasi Zona Integritas Hasil Asesmen Unit Utama	Nilai		-	-	-	-	75

Tabel 14. Sinkronisasi Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja (IK), dan Kegiatan Pendukung Sesuai KepMendibudristek Nomor 210/M/2023

Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Kode	Kegiatan Pendukung
IKU-1	Persentase lulusan S1 dan D4 /D3 /D2 /D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	IK-01	Persentase lulusan memiliki pekerjaan 12 (dua belas) bulan setelah lulus di perusahaan negeri dan swasta	K-01	Pengembangan Proyek Kolaboratif dengan Industri

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Kode	Kegiatan Pendukung
		IK-02	Persentase mahasiswa melanjutkan studi 12 (dua belas) bulan setelah lulus.	K-02	Peningkatan Jaringan Alumni dan Hubungan Industri
		IK-03	Persentase lulusan yang menjadi wiraswasta 12 (dua belas) bulan setelah lulus	K-03	Pelatihan Entrepreneurship
IKU-2	Persentase mahasiswa S1 dan D4 /D3/ D2/ D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	IK-04	Persentase mahasiswa menjalankan kegiatan MBKM	K-04	Peningkatan kualitas MBKM dan Pengajaran
		IK-05	Jumlah mahasiswa meraih prestasi tingkat internasional, nasional dan provinsi	K-05	Peningkatan keikutsertaan mahasiswa dalam lomba
		IK-06	Jumlah karya yang digunakan oleh DUDI dan masyarakat yang dihasilkan oleh mahasiswa	K-06	Peningkatan kualitas karya oleh mahasiswa
		IK-07	Jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi internasional	K-07	Peningkatan kompetensi mahasiswa
IKU-3	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan	IK-08	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir	K-08	Peningkatan kualitas dosen dalam tridharma di perguruan tinggi lain

Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Kode	Kegiatan Pendukung
	di luar program studi	IK-09	Jumlah dosen Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu (part time)	K-09	Meningkatkan partisipasi dosen dalam sebahai peneliti konsultan, asesor, pegawai penuh waktu full time, atau paruh waktu
		IK-10	Jumlah dosen yang Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan MBKM	K-10	Meningkatkan partisipasi dosen dalam kegiatan MBKM
		IK-11	Jumlah dosen yang Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba yang menjadi juara	K-11	Meningkatkan partisipasi dosen dalam pembimbingan mahasiswa
		IK-12	Jumlah dosen yang Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dal masyarakat.	K-12	Meningkatkan partisipasi dosen dalam Pendampingan mahasiswa
IKU-4	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	IK-13	Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif	K-13	Peningkatan kompetensi dosen

Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Kode	Kegiatan Pendukung
		IK-14	Dosen yang memiliki Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	K-14	
		IK-15	Dosen yang memiliki Sertifikasi Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional;	K-15	
		IK-16	Dosen yang memiliki Sertifikasi Dunia usaha dunia industri	K-16	
		IK-17	Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang berasal dari DUDI, pemerintah, dan Menjadi pekerja lepas (freelancer).	K-17	Peningkatan praktisi mengajar di kampus dari kalangan industri dan pemerintah
IKU-5	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat / industri/ pemerintah per jumlah dosen.	IK-18	jumlah Karya tulis ilmiah, Karya terapan, dan Karya seni dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.	K-18	Peningkatan karya tulis dosen yang di akui oleh DUDI dan Masyarakat
IKU-6	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	IK-19	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	K-19	

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Kode	Indikator Kinerja Utama	Kode	Indikator Kinerja	Kode	Kegiatan Pendukung
IKU-7	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	IK-20	pembelajaran di dalam kelas yang menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project).	K-20	Peningkatan kualitas pembelajaran melalui metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team based project).
IKU-8	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	IK-21	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	K-21	Peningkatan Akreditasi prodi
IKU-9	Predikat SAKIP	IK-22	Rata-rata Predikat SAKIP Satker	K-22	Peningkatan Nilai Hasil Implementasi SAKIP
IKU-10	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	IK-23	Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker	K-23	Peningkatan Evaluasi Kinerja Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran
IKU-11	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	IK-24	Nilai Evaluasi Zona Integritas Hasil Asesmen Unit Utama	K-24	Meningkatnya Pembangunan Reformasi Birokrasi

A. Kerangka Pendanaan

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Negeri vokasi, PNN menerima pendapatan dari beberapa sumber, antara lain adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pendapatan Jasa Layanan Pendidikan, dan Pendapatan Usaha Lainnya. Sumber pendapatan PNN tahun 2021 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan dari APBN, yaitu pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yang tertuang di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap tahunnya, disebut dengan Pendapatan Rupiah Murni yang terdiri dari Rupiah Murni Mengikat dan Rupiah Murni Tidak Mengikat;
2. Pendapatan Jasa Layanan, yaitu pendapatan yang diperoleh dari pungutan kepada mahasiswa dengan jenis pungutan:
 - a. Uang Kuliah Tetap/UKT yang dipungut setiap semester;
 - b. Biaya Seleksi Ujian Masuk Politeknik;
 - c. Biaya Wisuda (dipungut satu kali selama studi);
 - d. Diklatsar MABA (dipungut sekali selama studi);
 - e. Biaya Kelengkapan Mahasiswa Baru (dipungut sekali selama studi);

Rencana Strategis Politeknik Negeri Nunukan sudah menetapkan Indikator Kinerja pada setiap Program. Indikator-indikator tersebut kemudian dijadikan target kinerja semua unit kerja yang ada. Untuk mencapai target indikator kinerja tersebut, seluruh unit kerja akan menyusun program dan kegiatan tahunan dengan terlebih dahulu merencanakan kebutuhan anggaran agar kegiatan yang telah disusun dapat berjalan dengan baik dalam rangka pencapaian target indikator kinerja. Rekapitulasi seluruh kebutuhan anggaran lembaga yang merupakan gabungan dari kebutuhan anggaran seluruh unit kerja diusulkan kepada

Kementerian Keuangan untuk mendapat persetujuan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Jenis pendapatan Politeknik Negeri Nunukan dikelompokkan dalam dua sumber dengan rincian masing-masing sumber sebagai berikut:

- a. Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), merupakan anggaran yang bersumber dari :
 1. Alokasi belanja pegawai (gaji dan tunjangan PNS).
 2. Alokasi anggaran untuk operasional kantor.
 3. Alokasi Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
 4. Sumber lain termasuk pengadaan sarana prasarana kampus (SBSN).
- b. Pendapatan Non APBN, merupakan anggaran yang bersumber dari :
 1. Pendapatan biaya pendidikan.
 2. Pendapatan dari optimalisasi asset.
 3. Pendapatan dari jasa perbankan.
 4. Pendapatan dari kerja sama industri.
 5. Pendapatan dari hibah/penugasan.

Tabel dibawah ini menyajikan realisasi pendapatan Politeknik Negeri Nunukan yang bersumber dari APBN dan Non APBN

Tabel 15. Realisasi Dan Rencana Proyeksi Pendapatan Tahun 2020 - 2024

Kode Satker	Satuan Kerja	Tahun	Target	Realisasi	%
677641	Politeknik Negeri Nunukan	2022	Rp.1.181.215.000	Rp.1.315.505.681	111,36
677641	Politeknik Negeri Nunukan	2023	Rp.1.415.000.000	Rp.1.428.718.000	100,97
677641	Politeknik Negeri Nunukan	2024	Rp.1.485.750.000	Rp. -	-

Tabel 16. Kerangka Pendanaan tahun 2022-2023

Sasaran Kinerja	IKU	Pagu 2022	Pagu 2023
Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil: a. mendapat pekerjaan, melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	Rp. 1.220.000.000	Rp. 1.440.000.000
	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang: a. menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	Rp. 2.150.000.000	Rp. 2.390.000.000
Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	Rp. 195.000.000	Rp. 200.000.000
	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3, memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	Rp. 2.650.000.000	Rp. 3.055.000.000
	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Rp. 220.000.000	Rp. 245.000.000
Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	Rp. 135.000.000	Rp. 150.000.000
	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis proyek (team ased project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	Rp. 70.000.000	Rp. 75.000.000
	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	Rp. 150.000.000	Rp. 115.000.000

Sasaran Kinerja	IKU	Pagu 2022	Pagu 2023
Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Rp. 2.850.000.000	Rp. 3.102.000.000
	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Rp. 315.348.000	Rp. 553.279.000

Tabel 17. Kerangka Pendanaan 2024

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Utama	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024
1.0	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi	1.1	Persentase lulusan S1 dan D4 /D3 /D2 /D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	Rp. 2.711.392.000
		1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4 /D3/ D2/ D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi.	Rp. 2.450.000.000
2.0	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi	2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	Rp. 250.000.000

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Utama	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024
		2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.	Rp. 3.030.000.000
		2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat / industri/ pemerintah per jumlah dosen.	Rp. 320.000.000
3.0	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran	3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1.	Rp. 250.000.000
		3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi.	Rp. 125.000.000
		3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	Rp. 150.000.000
4.0	Meningkatnya tata kelola	4.1	Predikat SAKIP	Rp. 3.300.000.000

Kode	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Utama	Indikasi Kebutuhan Anggaran 2024
	Perguruan Tinggi Negeri	4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Rp. 811.458.000
		4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Rp. 70.000.000

BAB V

PENUTUP

A. Pedoman Pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Negeri Nunukan tahun 2020 - 2024 ini adalah sistem rencana pengembangan jangka menengah (RPJM) dengan rentang waktu lima tahunan dan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem perencanaan pengembangan jangka panjang (RPJP) Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020 - 2050. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 - 2024.

Harmonisasi ini diwujudkan menjadi Renstra Politeknik Negeri Nunukan revisi kedua Tahun 2020-2024. Penyusunan ini dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program kerja Politeknik Negeri Nunukan dengan kondisi-kondisi perubahan yang terjadi.

Dalam masa transisi sebagaimana dimaksud diatas, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) sebagai perencanaan dan peganggaran tahunan sudah harus diajukan setahun sebelum tahun berjalan, sehingga untuk RKAT tahun 2023 dan 2024 dapat tetap mengacu pada Renstra Politeknik Negeri Nunukan ini yang berlaku sampai tahun 2024. Dengan demikian Renstra Revisi Kedua Politeknik Negeri Nunukan tahun 2020-2024 ini dapat menjamin adanya kesinambungan dalam penyelenggaraan program kegiatan PNN dan memastikan, bahwa pada akhir perodesasi dari dokumen renstra ini tidak akan terjadi kekosongan regulasi.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Perubahan Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024 dijadikan sebagai landasan oleh Jurusan, UPT, Bagian, dan Pusat di lingkungan Politeknik dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang akan dituangkan kedalam dokumen rencana pengembangan empat tahunan dan rencana pengembangan duapuluh tahunan.

Berkaitan dengan itu, maka dalam Rencana Strategis Revisi Kedua Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024 perlu dirumuskan beberapa kebijakan tentang kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

- a. Direktur dan jajaran pimpinan di tingkat politeknik Jurusan, UPT, Bagian, dan Pusat di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan, berkewajiban untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Nunukan ini dengan penuh tanggung jawab;
- b. Direktur dan Wakil Direktur, dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan program kegiatan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan agar dalam implementasinya selaras dan sesuai dengan dokumen Renstra Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024;
- c. Untuk menjamin agar Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) setiap program dapat dicapai secara optimal, maka sesuai kewenangannya para Wakil Direktur berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024;
- d. Setiap Jurusan, UPT, Bagian, dan Pusat di lingkungan Politeknik Negeri Nunukan berkewajiban untuk menjabarkan Renstra Politeknik Negeri Nunukan Tahun 2020-2024 ke dalam dokumen perencanaan masing-masing dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) setiap tahun;

- e. Dalam upaya menjamin efisiensi dan efektivitas dalam Rencana Strategi Perubahan Politeknik Negeri Nunukan 2020-2024, Direktur dan Wakil Direktur berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh Jurusan, UPT, Bagian, dan Pusat dalam perumusan rencana kerja masing-masing;
- f. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Politeknik Negeri Nunukan 2020-2024, Direktur wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap dokumen rencana dan pelaksanaannya dengan dibantu oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) Politeknik Negeri Nunukan;

Dalam hal target capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja (IK) yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Politeknik Negeri Nunukan ini tidak dapat/sulit dicapai yang disebabkan oleh berbagai kendala yang bersifat eksternal, maka dokumen Renstra Perubahan Politeknik Negeri Nunukan ini dapat dilakukan revisi dan penyesuaian.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan

Kemendikbud 754/P/2020

Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Ribuan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	-	-	55	60	60	-	-	1.220.000	1.440.000	2.711.392	Wadir II
IKU 1.2	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	-	-	10	30	30	-	-	2.150.000	2.390.000	2.450.000	Wadir I & Wadir II
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 bg subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir	%	-	-	15	30	30	-	-	195.000	200.000	250.000	Wadir I

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Ribuan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	-	-	30	50	50	-	-	2.650.000	3.055.000	3.030.000	Wadir I
IKU 3.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil penelitian per jumlah dosen	-	-	0.10	0.30	0.40	-	-	220.000	245.000	320.000	Wadir I
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	-	-	35	100	100	-	-	135.000	150.000	250.000	Wadir I
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	-	-	35	40	40	-	-	70.000	75.000	125.000	Wadir I

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Ribuan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	150.000	115.000	150.000	Wadir I
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	-	-	BB	BB	BB	-	-	2.850.000	3.102.000	3.300.000	Wadir II
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	-	-	93.50	94	94	-	-	315.348	553.279	811.458	Wadir II

Keppmendikbud 3/M/2021

Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Ribuan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2 yang berhasil mendapat pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta.	%	-	-	55	60	60	-	-	1.220.000	1.440.000	2.711.392	Wadir II

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Ribuan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2 yang menghabiskan paling sedikit 20 (dua puluh) sks di luar kampus; atau meraih prestasi paling rendah tingkat nasional.	%	-	-	10	30	30	-	-	2.150.000	2.390.000	2.450.000	Wadir I & Wadir II
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridarma di kampus lain, di QS100 berdasarkan bidang ilmu (QS100 by subject), bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membina mahasiswa yang berhasil meraih prestasi paling rendah tingkat nasional dalam 5 (lima) tahun terakhir.	%	-	-	15	30	30	-	-	195.000	200.000	250.000	Wadir I
IKU 2.2	Persentase dosen tetap berkualifikasi akademik S3; memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh industri dan dunia kerja; atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.	%	-	-	30	50	50	-	-	2.650.000	3.055.000	3.030.000	Wadir I
IKU 3.3	Jumlah keluaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat per jumlah dosen.	Hasil Penelitian per jumlah dosen	-	-	0.10	0.30	0.40	-	-	220.000	245.000	320.000	Wadir I

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Ribuan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
SK 3.1	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang melaksanakan kerja sama dengan mitra.	%	-	-	35	100	100	-	-	135.000	150.000	250.000	Wadir I
SK 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis projek (team-based project) sebagai sebagian bobot evaluasi.	%	-	-	35	40	40	-	-	70.000	75.000	125.000	Wadir I
SK 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3/D2 yang memiliki akreditasi atau sertifikat internasional yang diakui pemerintah.	%	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	150.000	115.000	150.000	Wadir I
SK.4	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi												
SK 4.1	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	-	-	BB	BB	BB	-	-	2.850.000	3.102.000	3.300.000	Wadir II
SK 4.2	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	Nilai	-	-	93.50	94	94	-	-	315.348	553.279	811.458	Wadir II

Kepmendikbud 210/M/2023

Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Ribuan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SK.1	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi												
IKU 1.1	Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan; melanjutkan studi; atau menjadi wiraswasta	%	-	-	55	60	60	-	-	1.220.000	1.440.000	2.711.392	Wadir II
IKU 1.2	Persentase mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau meraih prestasi	%	-	-	10	30	30	-	-	2.150.000	2.390.000	2.450.000	Wadir I & Wadir II
SK.2	Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi												
IKU 2.1	Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi	%	-	-	15	30	30	-	-	195.000	200.000	250.000	Wadir I
IKU 2.2	Persentase dosen yang memiliki sertifikat kompetensi/profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri	%	-	-	30	50	50	-	-	2.650.000	3.055.000	3.030.000	Wadir I

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target					Alokasi (Dalam Ribuan)					Pelaksana/ PIC
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
IKU 2.3	Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen	Rasio	-	-	0.10	100	100	-	-	220.000	245.000	320.000	Wadir I
SK.3	Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran												
IKU 3.1	Jumlah kerjasama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1	Rasio	-	-	35	100	100	-	-	135.000	150.000	250.000	Wadir I
IKU 3.2	Persentase mata kuliah S1 dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (case method) atau pembelajaran kelompok berbasis project (team-based project) sebagai bagian dari bobot evaluasi	%	-	-	35	40	40	-	-	70.000	75.000	125.000	Wadir I
IKU 3.3	Persentase program studi S1 dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah	%	-	-	2.50	2.50	2.50	-	-	150.000	115.000	150.000	Wadir I
SK. 4	Meningkatnya tata kelola Perguruan Tinggi Negeri												
SK 4.1	Predikat SAKIP	Predikat	-	-	BB	BB	BB	-	-	2.850.000	3.102.000	3.300.000	Wadir II
SK 4.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L	Nilai	-	-	93.50	94	94	-	-	315.348	553.279	811.458	Wadir II
SK 4.3	Nilai evaluasi Zona Integritas hasil asesmen asesor Unit Utama minimal 75	Nilai	-	-	-	-	75	-	-	-	-	70.000	Wadir II

Lampiran 2. Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi pembentukan berdasarkan evaluasi Regulasi Existing, Kajian, dan Peneliti	PIC	Instansi terkait	Target Penyelesaian
1	Pedoman pelaksanaan tracer study	Standar dan pedoman Tracer Study (TS) diperlukan agar dapat dilakukan TS secara maksimum	Wadir II	PNN	Setiap tahun
2	Pedoman pelaksanaan MBKM dan Pedoman pelaksanaan mengikuti kompetisi	Kedua pedoman ini diperlukan agar dapat terlaksana MBKM yang bermanfaat dan capaian/prestasi maksimum	Wadir I	PNN	Setiap tahun
3	Pedoman kegiatan bertridarma di PT lain Pedoman dosen bekerja sebagai praktisi di dunia industri	Pedoman pedoman ini diperlukan oleh dosen shg dalam melakukan kegiatan memenuhi kebutuhan administratif dan capaian kinerjanya agar dapat diakui pelaksanaannya,	Wadir I	DUDI	Setiap tahun
4	Pedoman pelaksanaan kuliah dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, dan dunia industri	Pedoman ini diperlukan daam penentuan dosen praktisi yang akan mengaar di kampus	Wadir I	DUDI	Setiap tahun
5	Standar proses pembelajaran untuk case method dan PBL	Pedoman ini diperlukan agar RAB dan pelaksanaannya dapat diakui sebagai capaian IKU.	Wadir I	PNN	Setiap tahun
6	Pedoman ZI SK team penyusun ZI	Pedoman dan SK untuk kegiatan ini diperlukan agar target capaian IKU dapat terpenuhi.	Wadir II	PNN	Setiap tahun

Lampiran 3. Definisi Operasional, metode perhitungan, sumber data, dan PIC /pengampu Mengacu pada Kepmendikbudristek 210/M/2023

No.	Indikator Kinerja	Definisi, Kriteria, dan Formula	Satuan
Sasaran: Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi			
1.	<p>Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p> <p>a. memiliki pekerjaan; b. melanjutkan studi; atau c. menjadi wiraswasta</p>	<p>a. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di:</p> <p>1) perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain</p> <p>2) organisasi nirlaba; 3) institusi/organisasi multilateral; 4) lembaga pemerintah; atau 5) Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).</p> <p>b. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus.</p> <p>c. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai:</p> <p>1) pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau 2) pekerja lepas (freelancer).</p>	%

		<p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = responden yang merupakan lulusan SI dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta.</p> <p>t = total jumlah responden lulusan SI dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan).</p> <p>k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dan mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).</p> <p>Sumber : Tracer Study</p>	
2.	<p>Mahasiswa berkegiatan/meraih prestasi di luar program studi:</p> <p>Persentase mahasiswa SI dan D4/D3/D2/D1 yang:</p>	<p>a. Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa DI dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif:</p> <p>1) Magang atau praktik kerja:</p>	%

<p>a. menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi; atau b. meraih prestasi.</p>	<p>Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>).</p> <p>2) Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain.</p> <p>3) Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil.</p> <p>4) Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antarprogram studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa</p> <p>5) Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti</p> <p>6) Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain</p> <p>7) Studi atau proyek independen:</p>	
---	--	--

		<p>Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain</p> <p>8) Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).</p> <p>9) Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadangan, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh:</p> <p>a) perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau</p> <p>b) Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait.</p> <p>b. Kriteria prestasi Mahasiswa SI dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil:</p>	
--	--	---	--

		<p>1) Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tingkat internasional; tingkat nasional; atau tingkat provinsi. <p>2) Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat.</p> <p>3) Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula:</p> <p>a. Perguruan Tinggi Negeri Akademik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_n k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c k_n}{x} \times 30\right)$ <p>a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>y = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).</p>	
--	--	---	--

		<p>b. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi</p> <p>1) Formula untuk Politeknik</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_1 k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n a_2 k_n}{x} \times 25\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>2) Formula untuk Akademi Komunitas</p> $\left(\frac{\sum_1^n a_2 k_n}{x} \times 50\right) + \left(\frac{\sum_1^n b_n k_n}{x} \times 20\right) + \left(\frac{\sum_1^n c_n k_n}{y} \times 30\right)$ <p>a₁ = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>a₂ = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan magang wajib di luar program studi sesuai kriteria minimal.</p> <p>a₃ = jumlah mahasiswa D2/D1 yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal dan menjalankan kriteria magang wajib.</p> <p>b = jumlah mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal.</p> <p>c = jumlah prestasi oleh mahasiswa.</p> <p>x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi.</p> <p>y = total jumlah mahasiswa aktif.</p>	
--	--	--	--

		<p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi dan peringkat kejuaraan, dan lain-lain).</p> <p><i>Sumber : PDDIKTI dan Simkatmawa</i></p>	
Sasaran: Meningkatnya kualitas dosen pendidikan tinggi			
3.	<p>Dosen di luar kampus: Persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p>	<p>a. Syarat pelaporan ke pimpinan perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan harus sepengetahuan institusi atau pimpinan perguruan tinggi, minimal dengan persetujuan tingkat ketua departemen atau dekan; 2) format kegiatan dapat berupa kebijakan cuti meninggalkan tugas akademik dan administratif dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu untuk kepentingan riset atau menulis karya akademik dengan tetap mendapatkan penghasilan dari institusi tempatnya bekerja (<i>sabbatical leave</i>) atau paruh waktu (<i>part time</i>); 3) kegiatan harus disertai kontrak, surat tugas, atau surat keputusan di antara dosen dan organisasi luar kampus; dan 4) dosen dapat diberikan keringanan beban kerja atau jumlah sks yang harus dicapai selama sedang berkegiatan tridharma di luar kampus <p>b. Kriteria kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain</p>	%

		<p>Dosen yang melakukan kegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, baik di dalam maupun di luar negeri, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Daftar kegiatan dapat mengacu pada rubrik kegiatan beban kerja dosen. Beberapa contoh kegiatan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pendidikan: menjadi pengajar, pembimbing, penilai mahasiswa, membina kegiatan mahasiswa, mengembangkan program studi atau rencana kuliah, dan sebagainya. 2) Penelitian: memulai penelitian baru, membantu penelitian dosen di kampus lain, membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan, dan sebagainya. 3) Pengabdian kepada masyarakat: fasilitasi pembelajaran pengabdian masyarakat, fasilitasi kuliah kerja nyata, member! latihan kepada masyarakat, dan sebagainya. <p>c. Kriteria bekerja sebagai praktisi</p> <p>Dosen yang berpengalaman praktisi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja sebagai peneliti, konsultan, asesor, pegawai penuh waktu (<i>full time</i>), atau paruh waktu (<i>part time</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none">g) lembaga pemerintah; atauh) BUMN/BUMD <p>2) Menjadi wiraswasta pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) perusahaan multinasional;b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas;c) perusahaan teknologi global;d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; ataue) organisasi nirlaba nasional dan internasional. <p>3) Khusus untuk dosen dari Program Studi Seni Budaya dapat juga berkegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) berkreasi independen atau menampilkan karya;b) menjadi juri, kurator/ atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atauc) menjadi pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) sanggar.d) Kriteria membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. <p>Dosen yang membimbing mahasiswa dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir:</p> <ul style="list-style-type: none">1) Mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi;2) Membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi:
--	--	--

		<p>a) tingkat internasional; b) tingkat nasional; atau c) tingkat provinsi.</p> <p>3) Mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dunia usaha, industri dan masyarakat.</p> <p>4) Membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i a_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah dosen dengan (Nomor Induk Dosen Nasional) NIDN yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi.</p> <p>t = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi perguruan tinggi tempat pelaksanaan kegiatan tridharma, jenis kegiatan membimbing, tingkat prestasi mahasiswa dan sebagainya).</p> <p><i>Sumber : Sister, Simkatmawa dan PDDIKTI</i></p>	
4.	Kualifikasi dosen/pengajar: a. persentase dosen yang	a. Kriteria sertifikat kompetensi/profesi Dosen yang memiliki sertifikasi dari lembaga berikut:	%

	<p>memiliki sertifikat kompetensi/ profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri; atau</p> <p>b. persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia usaha, atau dunia industri.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) nasional dengan lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) aktif; 2) Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang diakui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 3) Lembaga atau asosiasi profesi atau sertifikasi internasional; 4) Perusahaan Fortune 500; atau 5) Dunia usaha dunia industri. <p>b. Kriteria pengajar yang berasal dari kalangan praktisi</p> <p>Praktisi mengajar di kelas sesuai dengan ketentuan minimal waktu per semester yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Praktisi berpengalaman kerja penuh waktu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bekerja di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala menengah ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; e) organisasi nirlaba nasional dan internasional; f) institusi/organisasi multilateral; g) lembaga pemerintah; atau h) BUMN/BUMD. 2) Menjadi wiraswasta pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) di: <ol style="list-style-type: none"> a) perusahaan multinasional; b) perusahaan swasta berskala kecil ke atas; c) perusahaan teknologi global; d) perusahaan rintisan (startup company) teknologi; atau 	
--	---	--	--

		<p>e) organisasi nirlaba nasional dan internasional.</p> <p>3) Menjadi pekerja lepas (<i>freelancer</i>).</p> <p>4) Khusus untuk praktisi mengajar di program studi seni budaya dan bidang industri kreatif dapat juga berpengalaman:</p> <p>a) berkreasi independen atau menampilkan karya;</p> <p>b) menjadi juri, kurator, atau panitia acara seni budaya tingkat nasional; atau</p> <p>c) menjadi pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>cofounder</i>) sanggar.</p> <p>Formula:</p> $\left(\frac{a}{x+y} \times 60\right) + \left(\frac{b}{x+y+z} \times 40\right)$ <p>a = jumlah dosen dengan NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang memiliki sertifikat kompetensi / profesi.</p> <p>b = jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia kerja.</p> <p>x = jumlah dosen dengan NIDN.</p> <p>y = jumlah dosen dengan NIDK.</p> <p>z = jumlah dosen dengan Nomor Urut Pendidik (NUP).</p> <p><i>Sumber : Sister dan PDDIKTI</i></p>	
5.	Penerapan karya dosen:	Kategori luaran yang mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan di masyarakat/industri/pemerintah:	Rasio

<p>Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapat rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen</p>	<p>a. Karya tulis ilmiah, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) artikel ilmiah, buku akademik, dan bab (<i>chapter</i>) dalam buku akademik; 2) karya rujukan: buku saku (<i>handbook</i>), pedoman (<i>guidelines</i>), manual, buku teks (<i>textbook</i>), monograf, ensiklopedia, kamus; 3) studi kasus; dan/atau 4) laporan penelitian untuk mitra. <p>b. Karya terapan, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk prototipe); dan/atau 2) Pengembangan invensi dengan mitra. <p>c. Karya seni, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) visual, audio, audio-visual, pertunjukan (<i>performance</i>)', 2) desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya; 3) karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik; dan/atau 4) karya preservasi (contoh: modernisasi seni tari daerah).
	<p>Formula:</p>
	$\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$
	<p>n jumlah karya dosen dengan NIDN/NIDK yang mendapat rekognisi internasional atau digunakan oleh masyarakat/industri/pemerintah.</p>
	<p>t jumlah dosen dengan NIDN/NIDK.</p>

		<p>k konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan tingkat rekognisi internasional atau penerapan oleh masyarakat/industri/pemerintah atas karya).</p> <p><i>Sumber : Sister</i></p>	
Sasaran: Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran			
6.	<p>Kemitraan program studi: Jumlah kerjasama per program studi SI dan D4/D3/D2/D1.</p>	<p>a. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pengembangan kurikulum bersama (merencanakan basil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2) menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis <i>project</i> (PBL); 3) menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4) menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5) mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6) menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; 7) menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; 8) menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; 9) menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>, dan/atau 10) melakukan kemitraan penelitian <p>b. Kriteria mitra:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) perusahaan multinasional; 2) perusahaan nasional berstandar tinggi; 	

	<p>3) perusahaan teknologi global; 4) perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 5) organisasi nirlaba kelas dunia; 6) institusi/organisasi multilateral; 7) perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8) perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9) instansi pemerintah, BUMN, dan/atau BUMD; 10) rumah sakit; 11) UMKM; 12) lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau 13) lembaga kebudayaan berskala nasional/bereputasi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{\sum_1^i n_i k_i}{t} \times 100$ <p>n = jumlah kerja sama pada program studi SI dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi SI dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra). <i>Sumber : Sikerma</i></p>	
--	--	--

7.	<p>Pembelajaran dalam kelas: Persentase mata kuliah SI dan D4/D3/D2/D1 yang menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>) sebagai bagian dari bobot evaluasi.</p>	<p>a. Kriteria metode pembelajaran</p> <p>Metode pembelajaran di dalam kelas harus menggunakan salah satu atau kombinasi dari metode pembelajaran pemecahan kasus (<i>case method</i>) atau pembelajaran kelompok berbasis project (<i>team-based project</i>).</p> <p>1) Pemecahan kasus (<i>case method</i>):</p> <p>a) mahasiswa berperan sebagai “protagonis” yang berusaha untuk memecahkan sebuah kasus;</p> <p>b) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau</p> <p>c) mahasiswa melakukan analisis terhadap kasus untuk membangun rekomendasi solusi, dibantu dengan diskusi kelompok untuk menguji dan mengembangkan rancangan solusi; atau</p> <p>d) kelas berdiskusi secara aktif, dengan mayoritas dari percakapan dilakukan oleh mahasiswa, sedangkan dosen hanya memfasilitasi dengan cara mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, dan observasi.</p> <p>2) Pembelajaran kelompok berbasis <i>project (team-based project)</i>:</p> <p>a) kelas dibagi menjadi kelompok lebih dari 1 (satu) mahasiswa untuk mengerjakan tugas bersama selama jangka waktu yang ditentukan;</p>	%
----	--	--	---

		<p>b) kelompok diberikan masalah nyata yang terjadi di masyarakat atau pertanyaan kompleks, lalu diberikan ruang untuk membuat rencana kerja dan model kolaborasi;</p> <p>c) setiap kelompok mempersiapkan presentasi/karya akhir yang ditampilkan di depan dosen, kelas, atau audiens lainnya yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif;</p> <p>d) dosen membina setiap kelompok selama periode pekerjaan proyek dan mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam kolaborasi; atau</p> <p>e) kelompok diberikan <i>project</i> dari dunia usaha industri.</p> <p>b. Kriteria evaluasi 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai akhir harus berdasarkan kualitas partisipasi diskusi kelas (<i>case method</i>) dan/atau presentasi akhir pembelajaran kelompok berbasis project (<i>teambased project</i>).</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah mata kuliah yang menggunakan <i>case method</i> atau <i>team-based project</i> sebagai metode pembelajaran dan bagian dari bobot evaluasi.</p> <p>t = total jumlah mata kuliah yang kelasnya diselenggarakan pada tahun berjalan.</p> <p>Sumber : PDDIKTI</p>	
--	--	---	--

8.	Akreditasi Internasional: Persentase program studi SI dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah.	<p>Kriteria akreditasi dan sertifikasi: Lembaga akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <p>Formula:</p> $\frac{n}{t} \times 100$ <p>n = jumlah program studi SI dan D4/D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah. t = jumlah program studi SI dan D4/D3 yang telah meluluskan minimal 1 (kali). Sumber : PDDIKTI</p>	%
9.	Rata-rata Predikat SAKIP Satker minimal BB	<p>a. Perencanaan Kinerja (30 %)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Komponen Keberadaan (6%) 2) Sub Komponen Kualitas (9%) 3) Sub Komponen Pemanfaatan (15%) <p>b. Pengukuran Kinerja (30%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Komponen Keberadaan (6%) 2) Sub Komponen Kualitas (9%) 3) Sub Komponen Pemanfaatan (15%) <p>c. Pelaporan Kinerja (15%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sub Komponen Keberadaan (3%) 	Nilai

		<p>2) Sub Komponen Kualitas (4,5%) 3) Sub Komponen Pemanfaatan (7,5%) d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) 1) Sub Komponen Keberadaan (5%) 2) Sub Komponen Kualitas (7,5%) 3) Sub Komponen Pemanfaatan (12,5%)</p>																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>KATEGORI</th> <th>NILAI</th> <th>INTERPRETASI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AA</td> <td>> 90 - 100</td> <td>Sangat Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>> 80 - 90</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>BB</td> <td>> 70 - 80</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>> 60 - 70</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>CC</td> <td>> 50 - 60</td> <td>Cukup (Memadai)</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>> 30 - 50</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>> 0 - 30</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Sumber : Spasikita</i></p>	KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan	A	> 80 - 90	Memuaskan	BB	> 70 - 80	Sangat Baik	B	> 60 - 70	Baik	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)	C	> 30 - 50	Kurang	D	> 0 - 30	Sangat Kurang	
KATEGORI	NILAI	INTERPRETASI																									
AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan																									
A	> 80 - 90	Memuaskan																									
BB	> 70 - 80	Sangat Baik																									
B	> 60 - 70	Baik																									
CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)																									
C	> 30 - 50	Kurang																									
D	> 0 - 30	Sangat Kurang																									

10	Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 93	<p>Nilai Kinerja Anggaran merupakan hasil penjumlahan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran (EKA) <ul style="list-style-type: none"> 1) Efektivitas (75%) <ul style="list-style-type: none"> a) Capaian RO (RVRO / TVRO) (75%) 2) Efisiensi (25%) <ul style="list-style-type: none"> a) Penggunaan SBK (10%) b) Efisiensi SBK (15%) b. 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran (IKPA) <ul style="list-style-type: none"> 1) Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> a) Revisi DIPA (10%) b) Deviasi Hal III DIPA (15%) 2) Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> a) Penyerapan Anggaran (20%) b) Belanja Kontraktual (10%) c) Penyelesaian Tagihan (10%) d) Pengelolaan UP & TUP (10%) e) Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA) 3) Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran <ul style="list-style-type: none"> a) Capaian Output (25%) <p><i>Nilai Kinerja Anggaran = [50% × Nilai EKA] + [50% × Nilai IKPA]</i></p> <p><i>Sumber : Spasikita</i></p>	Nilai
----	---	---	-------

11	<p>Nilai Evaluasi Zona Integritas Hasil Asesmen Unit Utama adalah minimal 75</p>	<p>Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.</p> <p>Dengan merujuk pada PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja / Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="788 630 1924 1241"> <thead> <tr> <th>Syarat</th> <th>Menuju WBK</th> <th>Komponen Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nilai Total</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Minimal Pengungkit</td> <td>40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bobot nilai minimal per area pengungkit</td> <td>60%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal</td> <td>18,25</td> <td>Memenuhi ambang batas 6 area perubahan / pengungkit</td> </tr> <tr> <td>a. Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal</td> <td>15,75 (survey 3,60)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal</td> <td>2,5</td> <td>Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 3</td> </tr> <tr> <td>Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal</td> <td>14,00 (survey 3,20)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai	Nilai Total	75		Nilai Minimal Pengungkit	40		Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%		Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan / pengungkit	a. Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)		b. Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,5	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 3	Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	14,00 (survey 3,20)		
Syarat	Menuju WBK	Komponen Nilai																									
Nilai Total	75																										
Nilai Minimal Pengungkit	40																										
Bobot nilai minimal per area pengungkit	60%																										
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	Memenuhi ambang batas 6 area perubahan / pengungkit																									
a. Nilai sub-komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survey 3,60)																										
b. Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,5	Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 3																									
Nilai komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima" minimal	14,00 (survey 3,20)																										

		<p>Ambang batas 6 area perubahan / pengungkit.</p> <table border="1" data-bbox="815 288 1883 600"> <thead> <tr> <th data-bbox="815 288 1637 352">Penilaian</th> <th data-bbox="1637 288 1883 352">Bobot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="815 352 1637 395">1. Manajemen Perubahan</td> <td data-bbox="1637 352 1883 395">8%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 395 1637 438">2. Penataan Tata Laksana</td> <td data-bbox="1637 395 1883 438">7%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 438 1637 481">3. Penataan Sistem Manajemen SDM</td> <td data-bbox="1637 438 1883 481">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 481 1637 525">4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja</td> <td data-bbox="1637 481 1883 525">10%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 525 1637 568">5. Penguatan Pengawasan</td> <td data-bbox="1637 525 1883 568">15%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="815 568 1637 600">6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</td> <td data-bbox="1637 568 1883 600">10%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dalam komponen hasil, Survey dilaksanakan setiap bulan dengan minimal responden 30 permasing-masing jenis survey. Perhitungan dilaksanakan dengan menggunakan skala indeks 1-4.</p> <p>Unit Pelaksana: Politeknik Negeri dan AKN dilingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.</p> <p>Metode Perhitungan: Formula: Target IKU = (60% x Komponen Pengungkit) + (40% x Komponen Hasil) Komponen Pengungkit terdiri atas Subkomponen Pemenuhan dan Subkomponen Reform</p> <p>Komponen Hasil terdiri atas : Komponen Pemerintah yang bersih dan Akuntabel (Survey Presepsi Anti Korupsi dan Kinerja Lebih Baik) + Komponen Pelayanan Prima.</p> <p>Satuan : Persen Tipe Perhitungan : Nonkumulatif Sumber Data : Aplikasi SiAzik</p>	Penilaian	Bobot	1. Manajemen Perubahan	8%	2. Penataan Tata Laksana	7%	3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%	4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%	5. Penguatan Pengawasan	15%	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%	
Penilaian	Bobot																
1. Manajemen Perubahan	8%																
2. Penataan Tata Laksana	7%																
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	10%																
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%																
5. Penguatan Pengawasan	15%																
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%																